

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI
DI PULAU SUMATERA**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

Nama : ARIKA YUNITA
NPM : 2005180053P
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : ARIKA YUNITA
N P M : 2005180053P
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI DI PULAU SUMATERA

DINYATAKAN : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


(Dr. SYLVIA VIANTY NANITA, S.E., M.Si)


(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing


(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)


(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : ARIKA YUNITA
N.P.M : 2005180053P
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
ALAMAT RUMAH : DESA JATI REJO, KECAMATAN PAGAR MERBAU
Judul Tugas Akhir : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI DI
PULAU SUMATERA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, Oktober 2024

Pembimbing Skripsi



SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Arika Yunita
NPM : 2005180053P
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Sri Endang Rahayu, S.E., M.Si.
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Perbaiki yg ada tanda coretan nya - Perbaiki cara penulisan artikel terdahulu	18/09/24	
Bab 5	- Perbaiki Pembahasan - Perbaiki penulisan kesimpulan	27/09/24	
Daftar Pustaka	- Perbaiki daftar Pustaka	04/10/24	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- Aee sidang meja hijau	9/10/24	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si.)

Medan, 9 Oktober 2024
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Sri Endang Rahayu, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIKA YUNITA
NPM : 2005180053P
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : DESA JATI REJO KECAMATAN PAGAR MERBAU
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI DI
PULAU SUMATERA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



ARIKA YUNITA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera

Arika Yunita

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email : arikayuni2910@gmail.com

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi negara berkembang maupun maju. Ketimpangan pendapatan di suatu negara biasanya dilihat dengan 2 indikator atau alat ukur, yakni koefisien gini (gini ratio) dan kurva lorenz. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera dan menganalisis estimasi pada PDRB, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Sumatera selama 10 tahun (2014-2023). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Pada penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan model ekonometrika. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Gini Ratio (GR) secara parsial. Sedangkan secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel Gini Ratio (GR).

Kata Kunci : Ketimpangan distribusi pendapatan, Gini ratio, PDRB, TPT, kemiskinan, IPM

ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting Income Distribution Inequality in Provinces of Sumatra Island

Arika Yunita

Development Economics Study Program

Email: arikayuni2910@gmail.com

Income distribution inequality is a common issue faced by both developing and developed countries. Income inequality in a country is typically measured using two indicators: the Gini coefficient (Gini ratio) and the Lorenz curve. High and sustainable economic growth is a key condition for economic continuity. The purpose of this study is to examine income distribution inequality in Sumatra Island and to analyze such as Gross Regional Domestic Product (GRDP), open unemployment rate, poverty, and the human development index that influence income distribution inequality in the provinces of Sumatra Island over a 10-year period (2014-2023). This research uses a descriptive quantitative method, employing econometric models. The type of data used in this research is secondary data. The results show that the variables of GRDP and the Open Unemployment Rate (OUR) do not have a significant partial effect on the Gini Ratio (GR). However, simultaneously, GRDP, OUR, poverty (P), and the Human Development Index (HDI) significantly affect the Gini Ratio (GR).

Keywords: *Income distribution inequality, Gini ratio, GRDP, OUR, poverty, HDI*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Di Pulau Sumatera”** guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa isi yang terkandung dalam Tugas Akhir ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, kemampuan dan pengalaman yang peneliti miliki dalam penyajiannya. Oleh karena itu dengan hati yang sangat tulus peneliti menerima kritik dan saran serta masukan yang membangun dari para pembaca, yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan kritikan yang membangun dari pihak-pihak yang bersangkutan demi kesempurnaan dalam perbaikan agar Tugas Akhir dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan dan pembelajaran serta dapat diteliti lebih lanjut. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan tugas akhir ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan, rezeki, dan ilmu kepada saya dan atas izin-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Cinta pertama dan panutan saya, Bapak Arbak Harahap, terima kasih sudah berjuang dan selalu berjuang untuk kehidupan saya, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberikan motivasi, memberikan dukungan sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Pintu Surga saya, Ibunda Rimbayani. Beliau sangat berperan penting dalam kehidupan penulis dan sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau tiada henti nya memberikan semangat serta do'a yang selalu mengiringi langkah saya sehingga saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Terima kasih untuk diri saya sendiri Arika Yunita, karena sudah bertahan dan berusaha keras serta berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penulisan Tugas Akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Hj Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Ibu Sri Endang Rahayu, S.E, M.Si., selaku dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan kepada saya tentang penulisan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Ekonomi pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
12. Bapak/ Ibu Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam akademik.
13. Kepada kakak dan abang kandung saya yang sudah memberikan dukungan serta memberikan semangat kepada saya.
14. Kepada Mhd. Theo Vanny, terimakasih telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini, baik tenaga maupun waktu yang telah diberikan serta memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Kepada rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan dukungan kepada saya.

16. Sahabat saya serta teman-teman saya yang sudah banyak membantu serta berkontribusi dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Medan, Juli 2024

Arika Yunita
NPM. 2005180053P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.3 Batasan Masalah	21
1.4 Rumusan Masalah	21
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teoritis	23
2.1.1 Pembangunan Ekonomi	23
2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik	24
2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis	26
2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B Chenery	28
2.1.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis	29
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	31
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik	34
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik	35
2.1.3 Investasi	35
2.1.4 Pendidikan	37
2.1.5 Ketimpangan	37
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	39
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.3 Kerangka Konseptual.....	46
2.4 Kerangka Konseptual Model Estimasi.....	47
2.5 Hipotesis.....	47
BAB III - METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Definisi Operasional	48
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.4 Jenis dan Sumber Data	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	63
4.1 Gambaran Umum.....	63
4.2 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian	91
4.3 Hasil Analisi Regresi Linier Berganda	104
4.4 Hasil dan Pembahasan	121
BAB VPENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi di Pulau Sumatera 2014-2024 (Miliar Rupiah).....	7
Tabel 1. 2 Indeks Ratio Gini Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2023	10
Tabel 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera (Persen) 2016- 2023	12
Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera tahun (Persen) 2014-2023	15
Tabel 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2023	18
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	49
Tabel 4.1. Jumlah Luas dan Banyaknya Pulau menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera	67
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa) tahun 2022-2023.....	69
Tabel 4.3 Jumlah tenaga kerja Sektor Informasi mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Orang) Tahun 2022	71
Tabel 4.4 PDRB Atas Dasar harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah) 2022-2023.....	71
Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah) 2022-2023.....	72
Tabel 4.6 PDRB Per Kapita Menurut Harga Kostan (Ribu Rupiah) 2022-2023.....	74
Tabel 4.7 Provinsi Presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera 2021-2022.....	77
Tabel 4.7 Presentase tingkat Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023.....	80
Tabel 4.8 Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah Yang Ada Di Pulau Sumatera tahun 2023.....	81
Tabel 4.9 Provinsi Presentase Tingkat Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023.....	82
Tabel 4.10 Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bukan) Menurut Provinsi Di Provinsi Sumatera Tahun 2022-2023	82
Tabel 4.11 Presentase Indeks keadalam kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023	88
Tabel 4.12 Presentase perkembangan manusia Menurut Provisinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023	89

Tabel 4.13 Rata-Rata lama Sekolah Penduduk Umur > 15 Tahun Menurut Provinsi di pulau Sumatera tahun 2022-2023.....	90
Tabel 4.14 Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS)	104
Tabel 4.15 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM).....	106
Tabel 4.16 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)	106
Tabel 4.17 Hasil Uji Chow Pada Model FEM	107
Tabel 4.18 Hasil Uji Hausman Pada Model REM	107
Tabel 4.19 Hasil Regresi Random Effect Model	108
Tabel 4.20 Hasil regresi Model Terbaik	109
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi.....	110
Tabel 4.22 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi.....	110
Tabel 4.23 Hasil Uji t.....	114
Tabel 4.24 Hasil Uji F.....	115
Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas	116
Tabel 4.26 Hasil Uji Heteroskedastisitas	116
Tabel 4.27 Hasil Uji Autokorelasi	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan PDB 2022-2023	6
Gambar 1.2	PDRB Pulau Sumatera 2014-2023 (Miliar Rupiah)	7
Gambar 1.3	Perkembangan Gini Ratio	9
Gambar 1.4	Indeks Gini Ratio Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2022	10
Gambar 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Periode Februari 2021- Februari 2024 (persen).....	11
Gambar 1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera (Persen) 2014-2023	12
Gambar 1.7	Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Indonesia Periode Maret 2013-Maret 2024	14
Gambar 1.8	Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera tahun 2014-2023 (ribu jiwa).....	15
Gambar 1.9	Indeks Pembangunan Manusia periode 2020-2023 (persen).....	17
Gambar 1.10	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2023	18
Gambar 2. 1	Kurva Lorenz.....	40
Gambar 2. 2	Kerangka Konseptual	46
Gambar 2. 3	Kerangka Konseptual Estimasi	47
Gambar 3.1	Uji t-hitung	58
Gambar 3.2	Uji f-hitung	59
Gambar 4.1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan utama Menurut Privinsi di pulau Sumatera tahun 2022	70
Gambar 4.2	Koefisien Gini provinsi Aceh (2014-2023).....	92
Gambar 4.3	Koefisien Gini provinsi Sumatera Utara (2014-2023)	93
Gambar 4.4	Koefisien Gini provinsi Sumatera Barat (2014-2023)	94
Gambar 4.5	Koefisien Gini Provinsi Riau (2014-2023)	95
Gambar 4.6	Koefisien Gini Provinsi Kep. Riau (2014-2023).....	97
Gambar 4.7	Koefisien Gini Provinsi Jambi (2014-2023)	98
Gambar 4.8	Koefisien Gini Provinsi Bengkulu (2014-2023)	100

Gambar 4.9 Koefisien Gini Provinsi Sumatera Selatan (2014-2023).....	101
Gambar 4.10 Koefisien Gini Provinsi Kep. Bangka Belitung (2014-2023)	102
Gambar 4.11 Koefisien Gini Provinsi Lampung (2014-2023).....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Semua negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi setiap rakyatnya dari segala lapisan, dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana pembangunan dan melaksanakannya melalui partisipasi masyarakat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Sehingga, peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan target dari setiap negara, dimana peningkatan kesejahteraan ini adalah bagian dari fungsi pemerintah sebagai agent of development dalam hal stabilisasi ekonomi. Maka sebaiknya, segala kebijakan yang direncanakan maupun yang diimplementasikan perlu mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga untuk menciptakan dalam peningkatan kesejahteraan tersebut perlu diiringi pembangunan ekonomi yang baik. (Nangarumba, 2015)

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan

pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa setiap tahunnya (Tambunan, 2001).

Pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercipta melalui bekerjanya pasar secara efisien. Mekanisme pasar akan bekerja secara efisien apabila tersedia tata aturan dan hukum-hukum pasar yang dilaksanakan dengan baik. Atas dasar itu, pemerintah melalui kebijakan makroekonomi, investasi, perdagangan, pelaksanaan hukum serta perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi bekerjanya pasar secara optimal.

Indonesia adalah salah satu negara sedang berkembang yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi selama beberapa periode. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari strategi pembangunan yang berpilar pada trilogi pembangunan, dengan prioritas pertumbuhan ekonomi di awal pembangunan orde baru. Mantapnya laju pertumbuhan ekonomi, selain meningkatkan perbaikan ekonomi, ternyata juga diikuti oleh ketimpangan distribusi pendapatan di beberapa daerah. Dinamika spasial pembangunan Indonesia memperlihatkan ketimpangan antar daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin

sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi didalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 2004). Menurut Sukirno (2010), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Arif, 2018)

Sejak tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Sejak tahun tersebut muncul pandangan baru yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi tidak lagi menciptakan tingkat pertumbuhan Gross National Product yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyedia lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro:2004)

Lebih lanjut Todaro mengatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atau struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun di negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di dalam masyarakat. Dalam proses produksi, para pemilik faktor produksi akan menerima imbalan seharga faktor produksi yang disumbangkan dalam proses produksi. Proses distribusi pendapatan ini akan terjadi siklus (perputaran) konsumen yang harus membayar harga barang. Akan tetapi pada saat lain akan menjadi penyedia faktor modal, tenaga kerja, sumber daya alam, atau faktor keahlian sehingga pada saat tertentu akan menerima bagian pendapatan dan pada saat lain akan membayar harga barang (Todaro, 2011)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi negara berkembang maupun maju. Ketimpangan pendapatan di suatu negara biasanya dilihat dengan 2 indikator atau alat ukur, yakni koefisien gini (gini ratio) dan kurva lorenz. Besarnya tingkat kesenjangan tersebut sekaligus memperlihatkan rendahnya keberhasilan negara dalam mengurangi angka kemiskinan. Kesenjangan ekonomi juga berisiko memicu banyak problem sosial, termasuk angka kriminalitas.

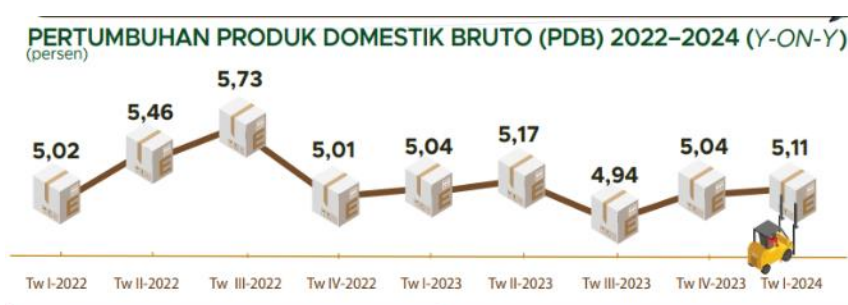
Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bias dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu setiap daerah selalu menetapkan

target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan tiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa maupun Produk Domestik Bruto(PDB) setiap tahunnya. Jadi menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional(Tambunan,2001).

Dalam melaksanakan pembangunan, upaya negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita kerap tidak selaras dengan proses pemerataan kekayaan. Akibatnya, ketimpangan pendapatan terjadi. Proses pembangunan bisa saja memajukan ekonomi suatu negara, tetapi mayoritas hasilnya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan ditandai oleh pemusatan kekayaan/kemakmuran di sebagian kecil populasi, atau di wilayah tertentu dari suatu negara. Sejumlah faktor penyebab ketimpangan pendapatan di setiap wilayah bisa saja berbeda. Hal ini karena kondisi perekonomian di setiap wilayah tidak sama. Namun, mengutip ulasan M. Farhan dan Sugianto di Jurnal Sibatik (Vol 1, 2022), secara umum ada beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, yakni jumlah penduduk (pertumbuhan populasi tinggi bisa meningkatkan ketimpangan) Inflasi (inflasi tak terkendali bisa meningkatkan ketimpangan) Pengangguran (Besarnya angka pengangguran bisa meningkatkan ketimpangan) Kemiskinan (tingginya angka kemiskinan bisa meningkatkan ketimpangan) Kebijakan

fiskal (Kebijakan fiskal tidak tepat bisa meningkatkan ketimpangan) Indeks Pembangunan Manusia/IPM (IPM rendah bisa meningkatkan ketimpangan).

Untuk menggambarkan kesejahteraan pada tiap penduduk di dalamnya, maka untuk mengukurnya menggunakan PDRB perkapita daerah, karena alat ini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

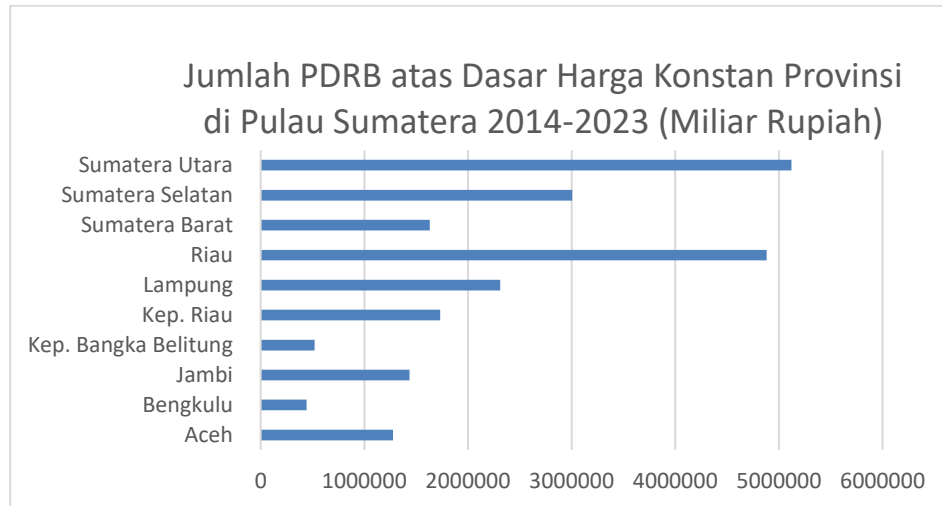
Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB 2022-2023

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 tumbuh sebesar 5,11 persen (Y-on-Y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 24,29 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,83 persen (Q-to-Q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 10,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam

sebesar 36,69 persen.

PDRB Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 2 PDRB Pulau Sumatera 2014-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat diperhatikan bahwa provinsi dengan PDRB terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara dengan angka 573,529 miliar rupiah yang terjadi pada tahun 2022 . Pada tahun yang sama Provinsi dengan pertumbuhan terbesar kedua ialah Provinsi Riau yaitu sebesar 529,533 miliar rupiah, Provinsi Sumatera Selatan berada di posisi ketiga dengan pertumbuhan PDRB sebesar 346,340 miliar rupiah. Pertumbuhan terbesar keempat yaitu sebesar 257,534 miliar rupiah terjadi di Provinsi Lampung. Disusul oleh Provinsi Kep.Riau yaitu sebesar 190,163 miliar rupiah, sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan pertumbuhan PDRB terkecil selama beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 49,916 miliar rupiah.

Kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah menjadi sebuah realita yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, berbagai kebijakan pun telah diambil dan diterapkan oleh pemerintah guna mengurangi kesenjangan ini namun adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab gejala ini tidak dapat dihindari.

Kriteria ketidak merataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh 3 lapisan penduduk yaitu : 40% penduduk berpendapatan terendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketimpangan distribusi dinyatakan sedang/moderat apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12%-17% pendapatan nasional. Ketimpangan distribusi dinyatakan lunak/cukup merata apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional.

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia ini sering pula dipakai sebagai Kriteria kemiskinan relatif. Isu pemerataan dan pertumbuhan kini masih menjadi debat tak berkesudahan dalam konteks pembangunan efektivitas dan efisiensi.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan melalui indeks gini ratio. Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa

memiliki nilai berapapun yaitu antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna).



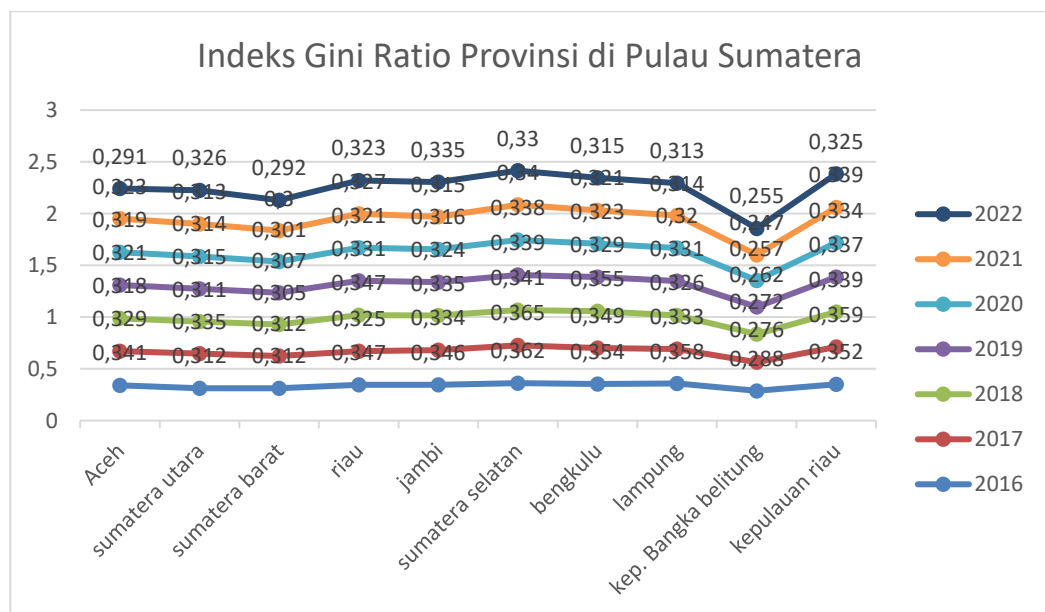
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Gambar 1.3 Perkembangan Gini Ratio
(September 2017-Maret 2024)**

Berdasarkan gambar 1.3 menjelaskan bahwa perkembangan gini ratio secara nasional sejak September 2017, angka gini ratio terus mengalami penurunan sampai dengan September 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Indonesia. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, angka gini ratio mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020. Setelah tahun 2020, angka gini ratio mengalami fluktuasi dan pada Maret 2023 mencapai 0,388 yang merupakan angka tertinggi sejak September 2018. Namun, gini ratio Maret 2024 sudah menurun kembali menjadi 0,379. Angka tersebut merupakan yang terendah sepanjang September 2017-Maret 2024. Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2024 semakin membaik. Jika dilihat berdasarkan daerah, gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 adalah sebesar 0,399. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan

sebesar 0,010 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,409 dan penurunan 0,003 poin dibanding kondisi September 2022 yang sebesar 0,402. Sementara itu, gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,306, menurun 0,007 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 dan September 2022 yang sebesar 0,313.

Secara umum, gini ratio Provinsi di Pulau Sumatera dapat diperhatikan dari gambar dibawah ini :



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

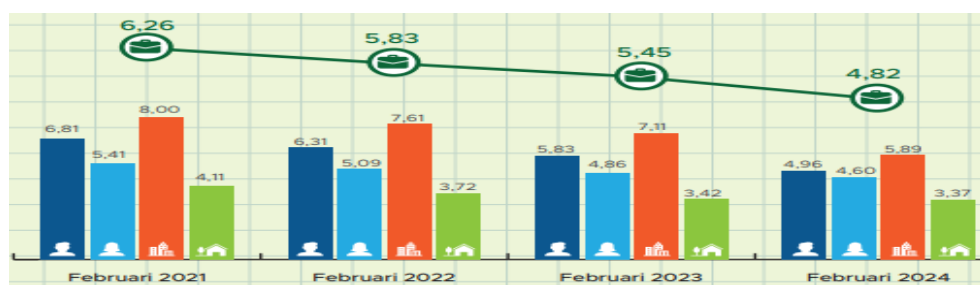
Gambar 1.4 Indeks Gini Ratio Provinsi di Pulau Sumatera 2016-2022

Berdasarkan gambar 1.4 menjelaskan bahwa peningkatan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Sumatera pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadinya penurunan, akan tetapi ada sebagian provinsi meningkat pada tahun sebelumnya. Rata-rata nilai yang dilihat berdasarkan data ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera berada pada tingkat ketimpangan yang sedang, akan tetapi perlu adanya kajian ilmiah yang harus dilakukan agar tingkat ketimpangan menurun menjadi ringan serta

menghindari kemungkinan adanya terjadi peningkatan atas ketimpangan tersebut.

Dapat dilihat secara keseluruhan dari gambar 1.4 tersebut bahwa terjadi fluktuasi setiap tahun nya di beberapa Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dapat dilihat dari ketimpangan antar Provinsi di Pulau Sumatera dari Provinsi yang ada, ketimpangan paling tinggi secara keseluruhan yang terjadi pada tahun 2016 terjadi di Provinsi Lampung sebesar 0.358 . Dalam hal ini angka sebesar 0.358 termasuk kategori ketimpangan yang sedang dan sangat mengawatirkan, dapat dilihat ketimpangan yang terjadi di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan yang sedikit signifikan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0.276 menurun menjadi 0.272 dengan angka sebesar 0.272 dapat dikatakan termasuk kategori rendah.

Selain masalah PDRB ada pula masalah lainnya yaitu pengangguran. Salah satu yang dapat menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu dengan melihat besarnya tingkat angka pengangguran.

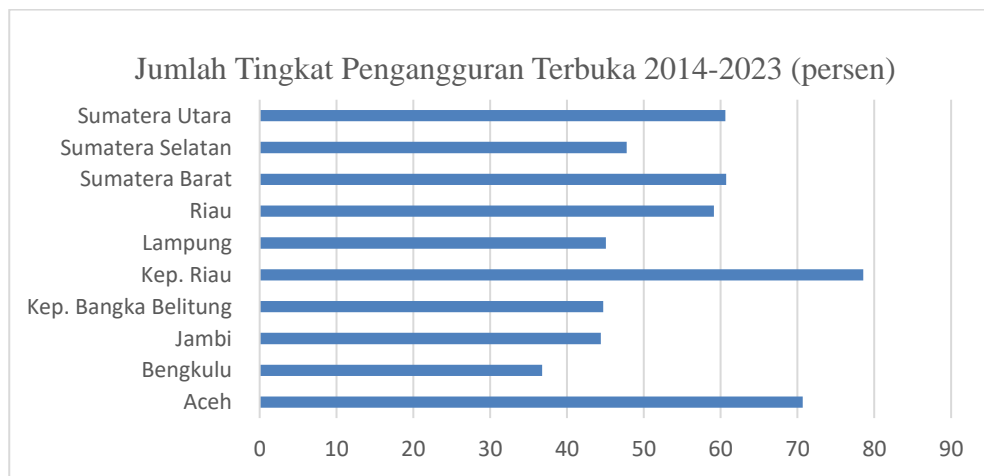


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

**Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia
Periode Februari 2021-Februari 2024 (persen)**

Berdasarkan gambar 1.5 menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2024 sebesar 4,82 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur. Pada Februari 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera (Persen) 2014-2023

Berdasarkan gambar 1.6 dapat dilihat persentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada tahun 2016 di provinsi Kepulauan Riau memiliki kenaikan sebesar 7,69% dan tingkat terendah ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 2,60%. Pada tahun 2017 juga merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi sebesar 7,16% dan terendah ada pada Provinsi Aceh dengan persentase 6,57.

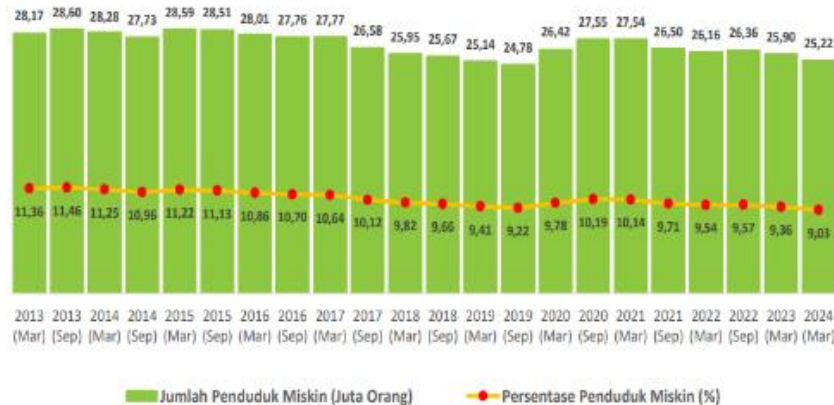
Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase 8,04 dan terendah ada pada

Provinsi Bengkulu dengan persentase 3,35. Adapun pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi berada pada Provinsi Kepulauan Riau dengan persentase 7,50 dan terendah berada pada Provinsi Bengkulu dengan persentase 3,26. Dapat dilihat dari uraian diatas Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera dalam 5 tahun terakhir 2016-2020, menunjukkan peningkatan dan penurunan di beberapa tahun, akan tetapi peningkatan umlah pengangguran yang paling tinggi ada di tahun 2020 karena timbul akibat dampak covid 19.

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi yang ada di Pulau Sumatera mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat bagus akan tetapi tidak dapat di pungkiri tingkat pengangguran terbuka di beberapa Provinsi yang ada di Pulau Sumatera masih memiliki persentase yang cukup tinggi bisa dilihat salah satunya yaitu di Provinsi Kepulauan Riau memiliki persentase 8,23 dan Sumatera barat pada persentase 6,28.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin antar propinsi di Indonesia berbeda, akan tetapi yang menjadi sorotan adalah jumlah penduduk miskin propinsi di Pulau Sumatera yang cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di luar Pulau Sumatera terutama Pulau Jawa. Padahal setiap propinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Akan tetapi provinsi-provinsi yang ada di pulau Sumatera tidak mendapatkan akses yang mudah, dimana akses untuk kepusat pemerintahan lebih susah begitu juga sebaliknya dari pusat ke daerah

yang ada di pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah yang ada di pulau Jawa. Dengan meningkatnya kemiskinan maka kesejahteraan akan menurun yang berarti akan terjadinya ketimpangan pendapatan antar provinsi maupun antar masyarakat. (Arif, 2018)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.7 Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Indonesia Periode Maret 2013-Maret 2024

Berdasarkan gambar 1.7 menjelaskan secara umum, pada periode Maret 2013–Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 0,68 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.8 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera tahun 2014-2023 (ribu jiwa)

Berdasarkan gambar 1.8 diketahui bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu ditahun 2013 sebesar 17,75%, tahun 2014 sebesar 17,09%, tahun 2015 sebesar 17,16% dan tahun 2016 sebesar 17,03%. Sementara Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ditahun 2013 sebesar 5,25%, tahun 2014 sebesar 4,97%, tahun 2015 sebesar 4,83% dan tahun 2016 sebesar 5,04%. Sedangkan periode tahun 2017-2020, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi

di Sumatera adalah Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2017 sebesar 15,92%, tahun 2018 sebesar 15,68%, tahun 2019 sebesar 15,01%, dan tahun 2020 sebesar 15,43%.

Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 19,48% dan terendah terjadi ditahun 2019 yaitu sebesar 15,01%. Tingkat kemiskinan tertinggi Provinsi Sumatra Utara ditahun 2011 sebesar 10,83% dan ditahun 2019 sebesar 8,63%. Di Provinsi Sumatra Barat tingkat kemiskinan tertinggi terjadi ditahun 2011 yakni sebesar 8,99% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 6,29%.

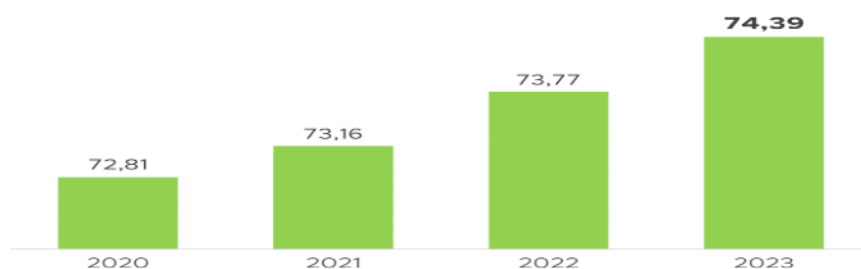
Adapun di Provinsi Riau tingkat kemiskinan tertinggi ditahun 2015 sebesar 8,82% dan terendah ada ditahun 2019 sebesar 6,9%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi ditahun 2015 sebesar 9,12% dan terendah ditahun 2019 sebesar 7,51%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatra Selatan ditahun 2013 sebesar 14,06 % dan terendah ditahun 2019 sebesar 12,56%.

Provinsi Bengkulu merupakan satu diantara Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Karena ditahun 2013, tingkat kemiskinan tertingginya yaitu sebesar 19,75% dan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Aceh ditahun 2019 yaitu sebesar 14,91%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada ditahun 2011 sebesar 16,58 % dan tingkat kemiskinan terendah ditahun 2019 sebesar 12,3%. Tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun 2012 sebesar 5,37%. Kemudian tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau ditahun 2012 sebesar 6,83% dan tingkat kemiskinan terendah ditahun 2019 sebesar 5,8%.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan terhadap

jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 15,53% dan mengalami penurunan yang sangat baik pada tahun 2022 sebesar 14,45%. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi kedua dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 14,43% di tahun 2021 dan menurun sebesar 14,04 pada tahun 2022.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia nya. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas yang rendah akan berpengaruh terhadap rendahnya pendapatan, begitu sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Hal ini dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini :



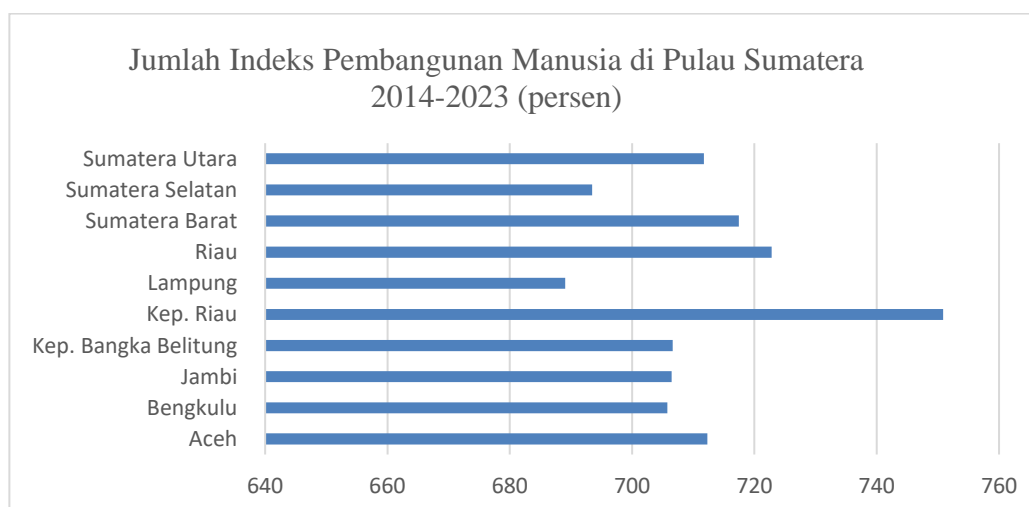
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1.9 Indeks Pembangunan Manusia periode 2020-2023 (persen)

Berdasarkan gambar 1.9 menjelaskan bahwa Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 74,39 pada 2023.

Peningkatan IPM 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,38

persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,15 persen dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,66 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,90 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,33 persen menjadi 0,31 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,76 persen menjadi 0,92 persen.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.10 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2023

Berdasarkan gambar 1.10 terdapat tingkat Indeks pembangunan manusia dimana perhitungan IPM berskala sangat tinggi dengan nilai diatas 80, tinggi dengan nilai antara 70 dan 80, sedang dengan nilai 60 dan 70 sedangkan rendah dengan nilai dibawah 60. Dapat kita lihat dari tabel diatas Kep. Riau merupakan salah satu provinsi tertinggi dengan nilai sebesar 76,46, provinsi tertinggi kedua yaitu Provinsi Riau dengan nilai 73,52. Dapat dilihat dari beberapa nilai di provinsi yang berada di Pulau Sumatera. IPM provinsi di Pulau Sumatera bisa dikatakan tinggi karena berada pada nilai antara 70

dan 80.

IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan. IPM di suatu daerah berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Keterkaitan kedua variabel ini dijelaskan oleh Becker dalam teorinya dimana kualitas IPM yang baik akan mendorong berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Dimana Becker menjelaskan bahwa pendidikan formal memiliki peran untuk mendorong perbaikan ekonominya. Semakin tinggi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh manusia maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Becker menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketidakmerataan tingkat IPM menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, ada daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ada pula daerah yang SDM nya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Becker (dalam Suryani & Woyanti, 2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.

Di Indonesia, Pulau Sumatera merupakan salah satu Pulau terbesar yang berada di wilayah Indonesia yang terdiri atas 10 Provinsi dan 152 Kabupaten/kota. Sebagai suatu wilayah yang secara umum memiliki

kemajuan ekonomi yang relatif lebih baik setelah pulau Jawa, di Pulau Sumatera juga terdapat adanya perbedaan kemajuan antar provinsi sebagaimana terlihat dari data PDRB dan koefisien gini diatas.

Ahli ekonomi Kuznets dan Kaldor yang menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah suatu kondisi yang diperlukan oleh sebuah negara dalam mencapai suatu peningkatan perekonomiannya. Semakin tinggi ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu negara, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik ialah menjaga agar distribusi pendapatan setimpang mungkin (Kuznet,1995).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Indonesia mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang meningkat sejak tahun 1990, hingga pada tahun 2023, tingkat koefisien gini mencapai 0,388.
2. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan, tetapi distribusi pendapatan tidak merata.
3. Perbedaan jumlah PDRB di masing-masing Provinsi di Pulau Sumatera

juga menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata.

4. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat, serta berpotensi menjadi isu politik dan stabilitas masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membatasi masalah yang diteliti mengenai kondisi ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sehingga peneliti memfokuskan memberikan gambaran yang lebih komperhensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera. Alasan penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan dan juga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Sumatera padaa tahun 2014-2023?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera
2. Melakukan estimasi pada variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di Pulau Sumatera selama 10 tahun (2014-2023).

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang di dapat selama mengikti perkuliahan di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga sebagai salah satu syarat gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, Provinsi di Pulau Sumatera sebagai referensi berupa masukan untuk menuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna secara akademik dan praktik dalam pengetahuan tentang potensi pertumbuhan wilayah khusus nya pada Pulau Sumatera

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per capita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional (gross national income-GNI) per kapita “rill” (pertumbuhan monetes dari GNI perkapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa rill yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro&Smith,2017).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno,2006)

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi adalah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan,2010)

2.1.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776 terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistemik namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan dibawah ini :

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industry perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan pengajur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan data produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatkan keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang, penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar, tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya, akan tetapi pembagian kerja tergantung besarnya pasar.

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis ”karna pemupukan stok

dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama dengan seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan menumpuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan”. Maka dari itu, cara yang paling tepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara tidak sistematis dalam bukunya *The Principle of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan tahun 1917. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lain lah yang menurut ide-ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu Analisa Ricardo merupakan Analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori- teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa :

1. Seluruh tanah digunakan produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industry.
2. “law of diminishing return” berlaku bagi tanah.
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan akan gandum benar-benar inelastis

5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknik adalah tertentu (*given*)
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal, dan baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja.
10. Terdapat persaingan yang sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan.

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teori nya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan, kapitalitas, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam bukunya. “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisme, dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan”. Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan dan upah (Jhingan,2010)

2.1.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sector modern dan juga system penetapan upah yang berlaku di sector modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa didaerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus

tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sector pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak diperkotaan, dimana sector yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian diperkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada system produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri diperkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalur berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah dikota 30% lebih tinggi dari dari upah pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sector modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi

modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada di industri tersebut.

2.1.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi kapital dan peningkatan sumber daya manusia (*human capital*). (Todaro&Smith, 2017)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industry, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi structural tersebut. Produktifitas disektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industry pada masa transisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro&Smith, 2017)

Salah satu dampak negatif dari perubahan structural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, dimana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu, disektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin

memperbesar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi structural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualis ekonomi antar desa dan kota. Jika hal ini dipenuhi maka proses tranformasi strukturan akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro&Smith,2017)

2.1.2.1 Teori Pembangunan ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei– Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak dibidang pertanian ditengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak dilapangan pertanian tradisional. Bidang–bidang nonpertanian memang ada tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industry yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja dibidang pertanian, yang sumbangan nya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan kesektor industry dimana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah dibidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut:

1. Ada ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional dan mandeg, dan sektor industri yang aktif
2. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja
3. Di sektor pertanian tidak ada konsumsi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi)

4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol. Jika penduduk melampaui jumlah dimana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (output) pertanian.
7. Output sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh saja.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
10. Pekerja masing-masing sektor hanya mengonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, para penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada tahap kedua, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali tahap ketiga, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar dari pada perolehan upah institusional. Didalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kuznet dalam jinghan (2012:57), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh dan sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagan dan ideologi yang diperlukan.

Menurut Murni (2006:173), pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang terjadi adanya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup di masyarakat. Menurut Sukirno(2010) Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pebgusaha di salam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter menyatakan makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi sekain terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang baru.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiksial produksi barang dan jasa berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastuktur, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rill yang dicapai (Sukirno, 2011 :43)

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan notabennya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.
2. Akumulasi Modal merupakan gabungan dari investasi baru yang didalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.
3. Kemajuan teknologi menurut ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikn cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukakn suatu pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam hal ini berkaitan denga output total (GDP) dn jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk (Boediono, 2009). Jadi kenaikan output perkapita harus dianalisi dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan

pertumbuhan penduduk. Usaha meningkatkan kapasitas produksi bagi capaian keluaran yang terukur dari penggunaan GDP ataupun PDRB pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi ialah kegiatan meningkatkan keluaran perkapita jangka panjang. Melalui hal ini bisa diamati aspek dinamika sebuah kegiatan ekonomi yakni cara sebuah aktivitas ekonomi mengalami perkembangan ataupun perubahan dari masa ke masa. Tekanan menyala perubahan maupun perkembangan tersebut. Pembangunan manusia juga harus bagian terpenting dari pembangunan, yaitu terkadang hanya dilihat dari segi ekonomi dan perspektif material (Rosyadah, 2021)

Indikator pertumbuhan ekonomi wilayah terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi parameter dalam mengamati pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah sebagaimana di bawah ini :

- a. Ketidakseimbangan pendapatan yang mutlak didistribusi secara berkeadilan, 80% terbawah populasi paling bawah kemudian mendapatkan 80% dari keseluruhan pendapatan, sementara 20% nya paling atas memperoleh 20% total pendapatan.
- b. Perubahan struktural perekonomian berubahnya struktur lisasi ekonomi dialami karena relativitas bahwasannya peranan sektor tani pad nilai PDRB mengalami penurunan, sementara sektor peranan sektor industri kemudian mengalami peningkatan.
- c. Pertumbuhan kesempatan kerja penduduk di Indonesia berjumlah 275 juta jiwa lebih, dan tongkat pengangurannya relatif tinggi serta terus mengalami pertambahan luas dikarenakan krisis finansial sejumlah negara di dunia.
- d. Tingkat dan penyebar kemudahan dalam hal ini dimaknai selaku kemudahan untuk hal-hal yang emiliki keperluannya, baik memenuhi keperluan hidup sehari-hari, misalnya bahan pokok, layamam pendidikan serta medis, kehidupan guna beribadah, berekreasi serta berbagai hal lainnya.
- e. Produk domestik regional bruto salah satu konsepsi yang terpenting untuk membangun ekonomi daerah ialah konsep

PDRB. PDRB adalah parameter kesuksesan perekonomian dari semua aktivitas perekonomian. Salah satu parameter dalam mengamati laju pertumbuhannya perekonomian di sebuah daerah ialah melalui penggunaan data PDRB.

Faktor pertumbuhan ekonomi terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi bertumbuhnya perekonomian.

1. SDA
2. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
3. IPTEK
4. Sistem sosial
5. Pasar

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.

Menurut Smith membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu : pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.
2. Sumber daya insani jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari

masyarakat.

3. Stok barang modal jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

2.1.2.2 Teori pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori Neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005).

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Investasi

Harrod- Domar memandang bahwa investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Karena itu semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan, dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan negara. Teori Harrod-Domar juga menjelaskan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal.

Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi disuatu wilayah atau daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan

mendorong munculnya proses produksi (output) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya. (Safina, L., & Rahayu, S.E. (2011)).

Menurut UU No. 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. Sedangkan menurut Sukirno (2006), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Besar kecilnya investasi yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut.

Investasi mampu mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja, melalui peningkatan pada investasi perusahaan akan memiliki lebih banyak modal untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan ka

Pasitas produksi akan datang. Besar kecilnya investasi yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat tersebut.

Investasi mampu mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja, melalui peningkatan pada investasi perusahaan akan memiliki lebih banyak modal untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi akan membutuhkan penambahan pada input produksi, seperti bahan baku dan juga tenaga kerja. Meningkatnya kapasitasnya produksi akan membuka kesempatan kerja baru. Adanya kesempatan kerja baru akan menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran. Dalam teori Neo Klasik, investasi dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan perekonomian, semakin tinggi

Investasi akan semakin banyak permintaan terhadap tenaga kerja yang disebabkan karena peningkatan produksi. Kurva permintaan tenaga

kerja yang bergeser akibat dari investasi, saat meningkat maka permintaan tenaga kerja akan bertambah. Jadi antara investasi dan pengangguran terdapat hubungan negatif.

2.1.4 Pendidikan

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan pada masyarakat di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang di capai atau diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pendidikan yang pernah di tempuh oleh seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia seorang tersebut. Tingginya tingkat pendidikan seorang tidak hanya bermanfaat pada diri seorang itu sendiri, selain meningkatkan cara berfikir dan memperluas pengetahuan, tingkat pendidikan seseorang juga bermanfaat bagi perekonomian dan lingkungan sekitarnya, karena dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah seseorang untuk mendapat pekerjaan dan tidak menambah jumlah yang ada.

Pendidikan adalah faktor penting dalam perekonomian dan juga pembangunan berkelanjutan karena merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan suatu produktivitas dan sebagai investasi sumber daya manusia. Peran penting dari pendidikan dalam kemajuan perekonomian adalah kemampuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam teori human capital dijelaskan bahwa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan peningkatan pendidikan.

2.1.5 Ketimpangan

Menurut (Khandker, Koolwal, & Samad, 2010), Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan kemiskinan, karena pada dasarnya konsep pengukuran ketimpangan adalah konsep

yang mengukur sebuah populasi yang besar, bukan hanya sebatas mengukur populasi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Ketimpangan bukan hanya diukur melalui rata-rata distribusi melainkan melalui aspek lain, cara pengukuran ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan membagi populasi menjadi seperlima (kuintil) dari yang paling miskin hingga yang paling kaya, dan meloporkan tingkat atau proporsi pendapatan (atau pengeluaran) yang bertambah ke setiap level. (Nadya & Syafri, 2019)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada hakikatnya distribusi pendapatan merupakan pengukuran dari kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan atau dengan kata lain pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi pendapatan di suatu daerah atau wilayah (Sukirno, 2013).

Menurut (Mudrajad Kuncoro, 1997) terdapat dua jenis ketimpangan didalam studi empiris yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan antar golongan masyarakat yang di ukur oleh Gini Rasio dan berapa kue nasional yang di nikmati oleh 40 persen golongan berpendapatan rendah. Ketimpangan yang terus meningkat di ukur melalui ketimpangan distribusi pendapatan dimana gini rasio meningkat. Ironisnya penurunan kue nasional 40 persen orang termiskin justru diikuti oleh peningkatan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya. Ternyata ada sebuah indikasi yang kuat terjadinya trickle-up effect, efek “muncrat” keatas, dalam proses pembangunan kita.

Menurut (Todaro, 1989), semakin timpang pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan meningkatnya agregat saving rate yang diikuti oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi di akibatkan oleh orang-orang kaya

memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin. Jika diasumsikan tujuan masyarakat satu-satunya hanyalah laju pertumbuhan PDRB, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin. Sebaliknya apabila keinginan masyarakat adalah pemerataan distribusi pendapatan maka laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat.

Menurut (Karl Mark, 1787) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan tenaga kerja. Kenaikan tingkat kenaikan upah dari tenaga kerja akan berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Akibatnya akan menimbulkan masalah pengangguran dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung hanya akan mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di tahap awal pembangunan saja, dan selanjutnya akan terjadi sebaliknya. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya suatu trade off antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi menurut (M Kuncoro, 2003), tergantung dari jenis data yang digunakan, apakah cross section atau time series atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan menghasilkan perhitungan yang berbeda karena menggunakan pendapatan yang berbeda.

Teori Harrod-Domar menjadi sebuah tambahan teori pertumbuhan ekonomi dimana teori Harrod-Domar adalah teori yang di kembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan Evsey Domar. Teori ini merupakan sebuah perkembangan dari teori keynes. Dasar pemikiran teori ini adalah analisis yang dilakukan oleh Keynes di anggap kurang lengkap karena tidak membahas tentang masalah-masalah ekonomi pada jangka panjang. Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang di perlukan agar perekonomian dapat tetap tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang (steady growth).

2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

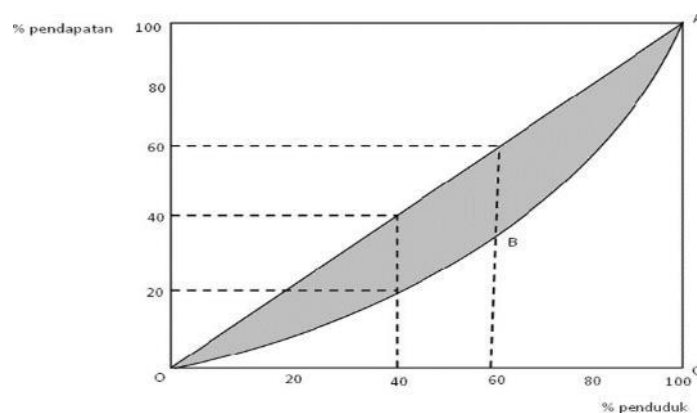
Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal

yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Ketimpangan Distribusi Pendapatan adalah Distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total diantara berbagai rumah tangga dalam negara (Todaro,2011). Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (Distribution Income Disparities), diantaranya yaitu :

1. Kurva Lorenz (Lorenz Curve)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.



Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.

2. Rasio Gini /Gini Ratio

Gini index adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah : $0 \leq G \leq 1$. Untuk menghitung Gini Index yaitu:

$$G = 1 - \sum (P_i - P_{i-1})(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana :

G = Gini Index

P_i = Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke-i

I = 1,2,3,...n

G = 0, Perfect Equality

G = 1, Perfect Inequality

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS: 2014). Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga yang berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga yang berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas harga konstan

dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar/referensi.

Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metod, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tak langsung biasa digunakan jika data yang diperlukan untuk menghitung PDRB tidak tersedia.

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil (tidak ada pengaruh harga). Ada empat cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu : revaluasi, ekstrapolasi, deflasi dan deflasi berganda. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

B. Pengangguran

Menurut Sukirno (2008: 13) dalam penelitian Rovia Nugrahani Prameshi (2013), pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Searah dengan pendapat diatas yang dikutip dari penelitian Rovia Nugrahani Pramesthi (2013) yang berjudul ‘Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek’ Murni (2006:197) pengangguran adalah orang-orang yang usianya berada dalam usia angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan.

Murni (2009: 191) memberikan penjelasan bahwa istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja (*labor force*). Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 65 tahun, yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja, serta mereka yang sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran berkaitan erat dengan tenaga kerja, menurut

payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lainnya, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun keatas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1(satu) jam secara kontinyu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur, (Budi santosa,2001), yang dikutip dari penelitian Deddy rustiono (2008), jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yangtersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Sukirno (2008 :330) menjelaskan (open unployment) adalah tenaga kerja yangbener-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka termasuk pengangguran yang sangat banyak karena memang belum mendapat pekerjaan meskipun sudah berusaha untuk mencapai pekerjaan.

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir keseluruhan negara-negara berkembang tanpa terkecuali di Indonesia. Bahkan perdebatan tentang kemiskinan dan penanggulangannya hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar untuk diselesaikan (Ayu et al., 2010). Kompleksitas dalam tinjauan permasalahan kemiskinan tersebut, tidak terlepas atas banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dinilai cukup kompleks dan hal ini tidak terlepas atas banyaknya variabel yang menentukan kemiskinan, sehingga dapatdikatakan bahwa tidak ada kemiskinan yang timbul disebabkan adanya faktor tunggal (Ginting & Rasbin, 2010). Uraian senada

dikemukakan pula oleh Asrol & Ahmad (2018) bahwa kompleksitas dan multidimensi atas kemiskinan disebabkan atas beragamnya definisi tentang kemiskinan. Dimana kemiskinan tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi, tetapi juga telah secara meluas terkait dengan berbagai dimensi, seperti sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. (Ayu et al 2010) menambahkan bahwa definisi kemiskinan yang bersifat multidimensi dan sulit diukur, mengakibatkan sering kali kebijakan yang diturunkan dalam mengetaskan kemiskinan menjadi inkonsistensi.

Menurut Haughton dan Shahidur(2012:3) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentatan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing- masing.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990 adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Dalam pengukuran IPM dapat dilihat hasil yang berkisar antara 0 sampai 100. Apabila hasil IPM mendekati angka 100, maka dapat diartikan bahwa IPM yang semakin baik dan sebaliknya apabila angka mendekatti 0 maka IPM semakin buruk (Pratowo, 2012).

IPM merupakan suatu indikator komposit tunggal yang tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dapat mengukur tiga dimensi pokok dalam pembangunan manusia yang dapat mencerminkan kemampuan (*basic capabilities*) penduduk. Adapun tiga kemampuan dasar yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta aksesterhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP juga menjelaskan pembangunan

manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Dalam pembangunan manusia terdapat hal-hal pokok yang harus diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (Setiawan, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

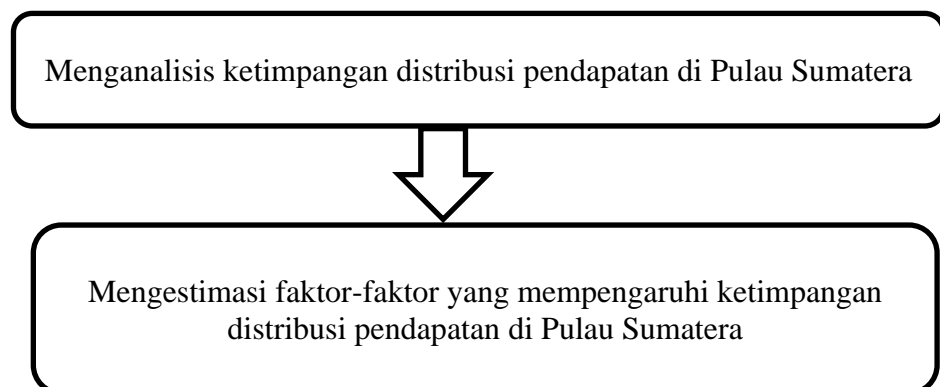
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sarina, 2019	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan variabel IPM dan Kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan.
2.	Aufa Nadya, dan Syafri, (2019)	Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap pendapatan ketimpangan, pada saat yang sama pendidikan mempunyai dampak positif dan pengangguran mempunyai dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Banten merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi
3.	Muhammad Rozali, (2020)	Faktor Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Implikasinya terhadap Kemiskinan Di Propinsi Sumatera Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen seperti inflasi, pertukaran petani suku bunga, ekspor, indeks pembangunan manusia, infrastruktur, dan suku bunga mempunyai pengaruh yang signifikan berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumsel, sedangkan nilai tukar petani, ekspor dan infrastruktur berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai pengaruh yang signifikan dampaknya terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan.
4.	Diah Pradnyadewi T Ida Bagus Putu Purbadharmaja, (2017)	Pengaruh Ipm, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap	hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi

		Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali	mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM dan investasi tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
5.	Annisa Febriyani,dan Ali Anis, (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia	Berdasarkan hasil uji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, investasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sebesar 10%.

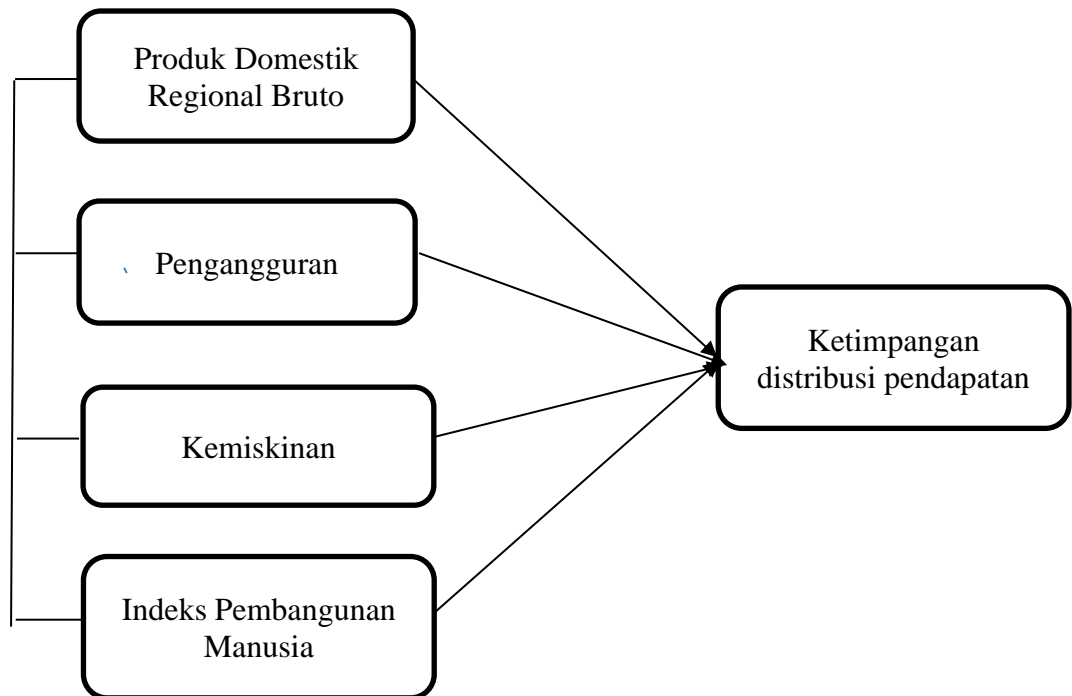
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.4 Kerangka Konseptual Model Estimasi



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Estimasi

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesis sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh antara PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera
2. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan antara Pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
3. Terdapat pengaruh Positif dan signifikan antara Kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
4. Terdapat pengaruh Negatif dan signifikan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
5. Terdapat pengaruh secara simultan PDRB, pengangguran, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2019), menjelaskan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan data berupa angka-angka sebagai hasil penelitiannya. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, atau peristiwa saat ini. Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang ada. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana anatar variabel satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Pengangguran, Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Sumber data
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio (besarnya Koefisien antara 0 s/d 1)	Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/
Produk Domestik Regional Bruto	1. Kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. 2. (Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku dalam satuan miliar rupiah pertahun)	Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/
Pengangguran	penduduk yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. (Jumlah Pengangguran Terbuka dalam satuan persen)	Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/ Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/
Kemiskinan	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. (ribu jiwa)	Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/
Indeks Pembangunan Manusia	Kualifikasi dari ukuran agregat kualitas manusia dalam pembangunan manusia dari UNDP (bernilai antara 0 sampai dengan 100 (satuan persen)	Badan Pusat Statistik https://bps.go.id/

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurun waktu 3 bulan pada awal bulan Mei-Juli pada tahun 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang sudah diolah, data sekunder disini menggunakan data antar tempat atau suatu ruang (cross section) yang diambil dari keseluruhan Provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan untuk data antar waktu (time series) diambil pada tahun 2014-2023, dimana data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data yang merupakan gabungan dari cross section dan time series yang digunakan dalam penelitian ini disebut data panel.

b. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil data skunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Koefisien Gini, PDRB, data pengangguran, data kemiskinan dan IPM dari tahun 2014-2023.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi

dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera.

3.6.2 Analisis Model Ekonometrika untuk Menganalisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera

a. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan data times series dan cross section yaitu data runtun waktu 10 tahun (dari tahun 2014 sampai 2023 dan 10 Provinsi di Pulau Sumatera),

Regresi Linear Berganda adalah suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antar variabel terikat dengan beberapa variabel bebas yang linier. (Roswita Hafni,2024)

Andaikan suatu fungsi $Y = f(x_i)$, Dimana $I = 1,2,3,\dots, n$

$Y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_i)$ maka persamaan regresi linier bergandanya adalah :

Y : Variabel terikat (Ketimpangan Distribusi Pendapatan)

X_1 = Variabel bebas (PDRB)

X_2 = Variabel bebas (K)

X_3 = Variabel bebas (TPT)

X_4 = Variabel bebas (IPM)

Maka model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$GR_{rt} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{rt} + \beta_2 TPT_{rt} + \beta_3 K_{rt} + \beta_4 IPM_{rt} + e$$

Dimana:

GR_{rt} = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio)

$PDRB_{rt}$ = Produk Domestik Regional Bruto dalam

TPT_{rt} = Tingkat Pengangguran Terbuka dalam satuan % t

K_{rt} = Kemiskinan t

IPM_{rt} = Indeks Pembangunan Manusia t

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien

rt = Unit Waktu (2014-2022) dan objek 10 provinsi di Pulau

Sumatera

e = *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

b. Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variable yang diamati menggunakan data data runtut waktu (time series dan cross section) dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2014 sampai 2023 dan 10 provinsi di Pulau Sumatera). Analisis trend dalam kurun waktu tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (Ordinary Least Square) dalam bentuk regresi linier berganda (multiple regression model) yang disajikan lebih

sederhana serta mudah dipahami.

c. Tahapan Analisis

1. Pemilihan Model Terbaik

a. Uji chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang sebaiknya digunakan, apakah Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dilakukan menggunakan Program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji Chow yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan model regresi yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM)
2. Apabila nilai probability dari Cross-section F dan Cross-section Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya digunakan. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian Hausman yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai probability dari Cross-section random $> 0,05$ maka H_0 diterima model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

2. Apabila nilai probability dari Cross-section random $< 0,05$ maka H_0 ditolak model regresi yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui apakah Random Effect Model lebih baik dari Common Effect Model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun ketentuan untuk pengujian Lagrange Multiplier yaitu sebagai berikut:

1. Apabila nilai cross section Breusch-pangan $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Common Effect Model (CEM).
2. Apabila nilai cross section Breusch-pangan $< 0,05$ maka H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

2. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimasi OLS yang BLUE (Blue Linear Unbiased Estimator) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak

multikolinearitas).

2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas).
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

a. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi multikolinieritas juga menyebabkan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati,2003)

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear, dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinieritas, akibat variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi auxiliary maka didalam model ini terjadi multikolinieritas.

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiensinya proses estimasi, sementara hal estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan uji white. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observation R - Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heterero dalam model terbaik.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antar lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada

tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskna apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2003).

3. Pengujian (Test diagnostic)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013).

Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT), Kemiskinan (K), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan(KDP) Provinsi di Pulau Sumatera . Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Hipotesis

- Hipotesis H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing- masing variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan setiap provinsi di Pulau Sumatera).

- Hipotesis $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan setiap provinsi di Pulau Sumatera).

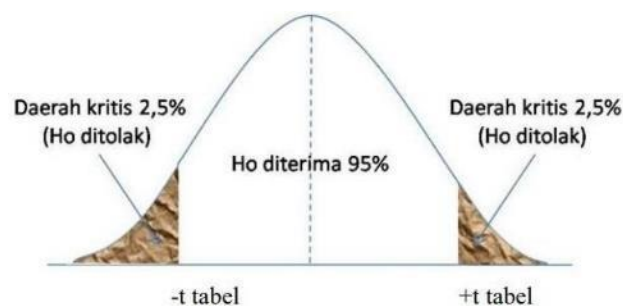
2. Uji statistik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah:

$$t_h = \beta_i / S_{e\beta_i}$$

Nilai thitung akan dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t(\alpha/2, n -$

3. Kriteria uji:

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Uji t-hitung

4. Kesimpulan: Sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0 .

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Dengan hal ini pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perumusan Hipotesis

- Hipotesis $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan pada setiap provinsi di Pulau Sumatera).

Hipotesis $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$ (ada hubungan yang signifikan secara serentak variabel Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan provinsi di Pulau Sumatera).

2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:

$$F_h = \frac{R^2 / K - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

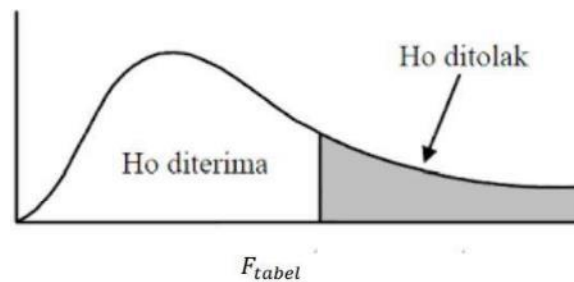
Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

1. Kriteria Uji: Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:

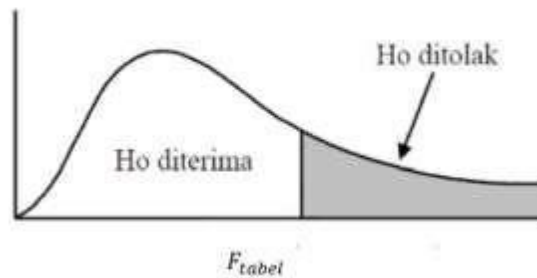


Gambar 3.2 Uji f-hitung

2. Kesimpulan : terima atau tolak H_0 : Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

3. Kriteria Uji

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



4. Penafsiran

a. Korelasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai r -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah suatu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam persamaan regresi yang dihasilkan. Misalnya, nilai (R^2) dalam suatu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan pengaruh (fungsional) antara variabel Y

sebagai variabel Y dependen dan variabel X sebagai variabel independen, yang diperoleh dari hasil perhitungan tertentu adalah 0,85. Ini artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh adalah 85% sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati atau berada di luar persamaan, (Roswita Hafni, 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Geografis Sumatera

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 3.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau Sumatera menjadi salah satu pulau terbesar yang ada di Nusantara(pulau yang lebih besar, Borneo, dikongsi bersama antara Indonesia dan negara-negara lain). Menilik gambar peta, Pulau Sumatera sangat mudah dikenal karena mirip dengan “garis miring”

Sumatera atau sumatra ialah sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Indonesia, yaitu bahagian paling barat dar Kepulauan Sunda. Secara geografis Pulau Sumatera terletak ibagian barat gugusan kepulauan Nusantara. Sumatera berada di 0° Lintang Utara (LU) dan 120° Bujur Timur (BT). Batas darat Pulau Sumatera: di utara, Sumatera berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, Di selatan, Sumatera berbatasan dengan Kepulauan Mentawai, di timur, Sumatera berbatasan dengan Pulau Kalimantan, di barat, Sumatera berbatasan dengan India. Pulau Sumatera memiliki peta perbatasan laut sebagai berikut: di utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Di selatan berbatasan dengan Selat Sunda, di timur berbatasan dengan Selat Malaka, Di barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Pulau Sumatera terdiri dari 10 provinsi yaitu: Aceh,

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Riau, Kep. Riau, Jambi Bangka Belitung.

1 Topografi

Pulau Sumatera juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan rumah bagi beberapa spesies hewan yang langka seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak tempat wisata yang indah dan unik, seperti Danau Toba, yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Selain itu, Sumatera juga memiliki hutan hujan tropis yang luas dan keindahan alam yang menakjubkan. Sumatera juga terkenal dengan hasil pertaniannya seperti kopi dan kelapa sawit serta memiliki beberapa kota besar seperti Medan, Padang, Palembang dan Pekanbaru. Sumatera juga memiliki dataran tinggi dan dataran tinggi yaitu:

1) Dataran Rendah dan Tinggi di Pulau Sumatera

Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi di daerah yang relatif rata. Mayoritas dari dataran rendah yang ada di pulau Sumatera, lokasinya terletak pada wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut bisa terjadi, mengingat wilayah Jambi memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Sumatera.

Berikut ini adalah daftar kawasan atau daftar dataran rendah yang ada di wilayah Pulau Sumatera : dataran rendah Asahan, dataran rendah Muaro Jambi, dataran rendah Batanghari, dataran rendah Tanjung Jabung Timur, dataran Rendah Tanjung Jabung Barat, dataran rendah Merangin, dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin, Air Manis, dataran rendah

Palembang, dataran rendah pantai Barat Bengkulu, dataran rendah Bengkulu Utara, dataran rendah Mukomuko. Dataran tinggi adalah daerah yang letaknya diatas 1000 meter dari permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Pulau Sumatra di antaranya adalah Dataran Tinggi Alas dan Gayo (Aceh), Dataran Tinggi Kayo (Sumatra Utara), Dataran Tinggi Agam (Sumatra Barat).

2) Kondisi Iklim Pulau Sumatera

Iklim Indonesia secara umum dipengaruhi oleh kondisi musim yang menghasilkan Arus Monsun Indonesia (Armondo). Dan karena letak Indonesia yang berada diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menimbulkan Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Hal lain yang mempengaruhi kondisi musim di Indonesia adalah posisi Matahari yang melintasi ekuator dua kali setiap tahun. Pada saat kedudukan matahari di atas belahan bumi utara menyebabkan tekanan rendah di belahan bumi utaradi Asia dan tekanan tinggi di belahan bumi selatan di Australia. Hal inilah yang mengakibatkan di Indonesia terjadi sirkulasi sistem monsun yang ditandai dengan terbentuknya hutan tropika basah di sebagian besar wilayah Indonesia. Secara umum, Indonesia mengalami musim hujan pada periode Oktober – Maret dan musim kemarau pada periode April – September, dengan masa transisi menjelang awal/akhir periode tersebut.

Sumatera tergolong daerah tipe iklim A (sangat basah) yang puncak musim hujannya jatuh antara Oktobr dan Januari, kadang hingga Februari. Berdasarkan iklim ini, Sumatera memiliki hutan gambut yang umumnya berada di daerah tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur sumatera hutan

hujan tropis, dan hutan muson. Selain itu juga memiliki Hutan hujan tropis yang umumnya menempati daerah tipe iklim A dan B pula. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar Pulau Sumatra. Hutan Mangrove berada di pantai timur Sumatera. Dari pola hujan Sumatera termasuk tipe hujan equatorial artinya puncak hujan terjadi dua kali dalam setahun pada saat posisi matahari berada diatas equator atau tepatnya puncak curah hujan terjadi satu bulan setelah matahari tepat diatas khatulistiwa: yaitu bulan April-Mei atau Oktober-November.

Sumatera bagian timur (pantai timur dan lereng timur) semakin menuju pantai atau hilir, curah hujan semakin rendah atau tipe E2, sebaliknya semakin menuju ke lereng pegunungan atau hulu curah hujan semakin tinggi (tipe C1, B1 atau A). Bahkan di Langkat dan Simalungun daerah hulu merupakan tipe A, artinya bulan basah lebih dari 9 bulan atau hampir sepanjang tahun terjadi hujan. Sebaliknya di bagian barat (pantai barat-lereng barat) curah hujan semakin besar menuju pantai (hilir) dan semakin kecil menuju lereng pegunungan atau hulu. Demikian juga di pantai barat tipe iklimnya A artinya hampir sepanjang tahun hujan terjadi.

Seperti halnya curah hujan untuk bagian timur Sumatra di hulu lebih besar dari dihilir, sementara di bagian barat hilir lebih besar dari di hulu. Untuk DAS dipantai timur umumnya panjang dan luas sehingga potensi air hujan yang ditangkap cukup besar dan perlu pengelolaan yang serius supaya supaya tidak banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Untuk DAS di bagian barat rata-rata kecil dan tidak panjang, kecuali DAS Batang Natal. Dengan perkembangan perkotaan curah hujan

di lereng yang menghadap pantai dan perkotaan pun akan bertambah besar, sebab angin ke arah lereng akan didorong angin laut yang kuat, hal ini mengakibatkan hujan orografis akan semakin mudah terbentuk, maka intensitas hujan pun akan semakin tinggi. Hujan orografis dapat terjadi dengan mudah di Sumatera dikarenakan oleh adanya deretan pegunungan Bukit Barisan, dimana masa udara dipaksa naik oleh adanya pegunungan tersebut, sehingga terjadilah hujan orografis tersebut.

2 Luas Wilayah

Luas wilayah Pulau Sumatera di perkirakan mencapai 480.849,51 km². Pulau Sumatera merupakan pulau terluas ke-3 di Indonesia dan merupakan Pulau terluas ke-6 di Dunia.

Berikut dibawah ini jumlah luas dan banyaknya pulau menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera :

Tabel 4.1. Jumlah Luas dan Banyaknya Pulau menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera

Provinsi	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Jumlah Pulau
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,02	363
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,81	229
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,19	218
Riau	Pekan Baru	87.024,66	4,54	144
Jambi	Jambi	50.058,16	2,61	14
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,78	24
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	9
Lampung	Bandar Lampung	34.623,80	1,81	172
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	507
Kep. Riau	Tanjung Pinang	8.256,72	0,43	2.025
Jumlah		480.849,51	25,09	3.775

Sumber : BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa provinsi dengan luas daerah terbesar di pulau sumatera adalah Provinsi sumatera dengan luas wilayah 480.849,51 km^2 , total persentase wilayah yang ditampilkan adalah 25,09% menunjukkan total luas Sumatera relatif terhadap wilayah Indonesia. Jumlah total pulau yang ada di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera adalah 3.775 pulau.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah terluas di Pulau Sumatera dengan 91.592,43 km^2 , sedangkan Kepulauan Riau memiliki luas wilayah terkecil dengan 8.256,72 km^2 , Kepulauan Riau memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 2.025 pulau, meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, provinsi Riau mencakup sekitar 4,54% dari luas Pulau Sumatera, sementara provinsi dengan kontribusi luas wilayah terbesar adalah Sumatera Selatan dengan 4,78%.

4.1.2 Kondisi Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Pulau Sumatera pada tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan, seiring dengan tren pertumbuhan penduduk di Indonesia secara umum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, meskipun laju pertumbuhannya melambat dibandingkan dekade sebelumnya. Sumatera, sebagai pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan, menyumbang sekitar 21% dari total populasi Indonesia dengan populasi sekitar 58-60 jiwa berdasarkan data terakhir (perkiraan 2020-2023).

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa) tahun 2022-2023

Provinsi di Pulau Sumatera	Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa)	
	2022	2023
Aceh	5.333,9	5.409,2
Sumatera Utara	14.970,5	15.180,5
Sumatera Barat	5.597,3	5.677,6
Riau	6.466,8	6.555,8
Kep. Riau	2.089,9	2.121,5
Jambi	3.586,4	3.633,2
Sumatera Selatan	8.548,6	8.647,3
Kep. Bangka Belitung	1.471,8	1.492,0
Bengkulu	2.032,4	2.059,4
Lampung	4.438,6	4.496,6
Jumlah	947836	55273,1

Sumber : BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Dapat dilihat dari tabel 4.1 bahwa setiap provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan penduduk, meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Misalnya, Aceh mengalami kenaikan sekitar 75 ribu jiwa dari 2022 ke 2023, sementara Sumatera Utara bertambah sekitar 210 ribu jiwa. Provinsi dengan Jumlah Penduduk terbesar adalah pulau Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk terbesar di antara provinsi lain di Sumatera, dengan lebih dari 15 juta jiwa pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut adalah pusat populasi terbesar di Sumatera. Provinsi dengan jumlah penduduk terkecil adalah provinsi Kepulauan bangka belitung karna memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 1,4 juta jiwa di tahun 2023. Provinsi ini terus mengalami sedikit kenaikan populasi. paling sedikit, yaitu sekitar 1,4 juta jiwa di tahun 2023. Provinsi ini terus mengalami sedikit kenaikan populasi. Pada tahun 2023, total

jumlah penduduk di Pulau Sumatera mencapai 95,5 juta jiwa, naik dari 94,7 juta jiwa di tahun 2022. Ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil. Peningkatan jumlah penduduk ini bisa dipengaruhi oleh faktor kelahiran, migrasi, dan tingkat urbanisasi di beberapa provinsi. Provinsi-provinsi dengan pusat ekonomi yang lebih besar, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan, cenderung menarik lebih banyak penduduk.

B. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Berikut dibawah ini adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi di pulau sumatera tahun 2022.

Agustus 2022								
Status Pekerjaan Utama								
Provinsi	Berusaha sendiri	Berusaha dibantu		Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di nonpertanian	Pekerja keluarga/tak dibayar	Jumlah
		buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	buruh tetap/buruh dibayar					
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	604 272	318 339	80 333	842 954	146 394	102 538	300 164	2 394 994
Sumatera Utara	1 442 845	1 033 192	264 083	2 681 903	295 867	360 062	1 119 422	7 197 374
Sumatera Barat	653 862	433 372	93 174	840 702	159 216	120 536	387 302	2 688 164
Riau	694 008	345 988	179 443	1 277 659	233 706	103 379	334 746	3 168 929
Jambi	440 747	234 315	90 532	628 911	101 742	44 086	257 486	1 797 819
Sumatera Selatan	1 012 639	730 512	105 224	1 470 045	92 464	93 482	785 338	4 289 704
Bengkulu	225 584	191 607	39 042	297 741	63 923	37 795	181 804	1 037 496
Lampung	878 210	889 961	114 933	1 135 028	317 382	244 568	807 884	4 387 966
Kepulauan Bangka Belitung	206 889	63 206	43 138	325 048	16 058	17 136	59 517	730 972
Kepulauan Riau	228 843	66 721	37 329	698 846	6 322	41 320	76 616	1 155 997

Sumber; BPS Sumatera Utara (www.bps.go.id)

Gambar 4.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan utama Menurut Provinsi di pulau Sumatera tahun 2022

Dapat dilihat Provinsi yang ada di pulau Sumatera terbanyak adalah Provinsi Sumatera utara dengan 7.197.347 juta jiwa di posisi kedua ada Provinsi Lampung dengan 4.387.966 juta jiwa, untuk jumlah yang

terkecil ada di provinsi Kep. Bangka Belitung dengan 1.037.496 juta jiwa.

Berikut dibawah ini jumlah tenaga kerja menurut Provinsi yang ada di pulau Sumatera Utara (orang) tahun 2022.

Tabel 4.3 Jumlah tenaga kerja Sektor Informasi mikro dan Kecil Menurut Provinsi (Orang) Tahun 2022

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Provinsi (Orang)	
	Mikro	Kecil
Aceh	180.314	10.200
Sumatera Utara	233.331	47.200
Sumatera Barat	167.048	18.160
Riau	88.301	6.447
Jambi	42.643	5.509
Sumatera Selatan	134.620	11.608
Bengkulu	37.621	1.328
Lampung	16.382	9.634
Kep. Bangka Belitung	35.638	4.776
Kep. Riau	22.074	1.004

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Tabel diatas menunjukkan Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah terbesar untuk jumlah tenaga kerja pada usaha mikro sebesar 233.331 orang dan usaha kecil sebanyak 47.200 orang lalu, tersebar ke-2 terbanyak kedua dimiliki Provinsi Sumatera Barat. Dan jumlah terkecil adalah Provinsi Kep. Riau dengan usaha mikro sebesar 22.074 orang dan usaha keciln sebanyak 1.004 orang.

4.1.3 Kondisi Ekonomi

A. Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada

dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Berikut jumlah nilai Produk Domestik regional Bruto menurut harga konstan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2022-2023 :

Tabel 4.4 PDRB Atas Dasar harga Konstan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Milyar Rupiah) 2022-2023

Provinsi	PDRB Harga Konstan (Milyar Rupiah)	
	2022-2023	
	2022	2023
Aceh	140.971,72	146.932,42
Sumatera Utara	573.528,77	602.235,95
Sumatera Barat	182.629,14	191.071,35
Riau	529.532,98	551.828,49
Jambi	161.730,02	169.268,77
Sumatera Selatan	343.459,88	360.911,01
Bengkulu	49.916,06	52.040,88
Lampung	257.534,19	269.240,54
Kep. Bangka Belitung	57.805,15	60.338,14
Kep. Riau	190.163,70	200.043,86

Sumber : Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan data PDRB Harga Konstan dari tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Aceh meningkat dari 140.971,72 miliar rupiah pada 2022 menjadi 146.932,42 miliar rupiah pada 2023. Kenaikan ini

menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 4,2%. PDRB Sumatera Utara juga mengalami kenaikan signifikan dari 573.528,77 miliar rupiah pada 2022 menjadi 602.235,95 miliar rupiah pada 2023. Pertumbuhan ini sebesar sekitar 5%, mencerminkan ekonomi yang berkembang pesat. Sumatera Barat mencatat kenaikan dari 182.629,14 miliar rupiah pada 2022 menjadi 191.071,35 miliar rupiah pada 2023, menunjukkan pertumbuhan sekitar 4,6%.

PDRB Riau meningkat dari 529.532,98 miliar rupiah pada 2022 menjadi 551.828,49 miliar rupiah pada 2023. Pertumbuhan sebesar sekitar 4,2% mengindikasikan bahwa sektor ekonomi Riau juga mengalami perkembangan. Jambi mengalami pertumbuhan dari 161.730,02 miliar rupiah pada 2022 menjadi 169.268,77 miliar rupiah pada 2023, dengan pertumbuhan sekitar 4,7%. PDRB Sumatera Selatan meningkat dari 343.459,88 miliar rupiah pada 2022 menjadi 369.911,01 miliar rupiah pada 2023, yang merupakan pertumbuhan sebesar 7,7%, salah satu yang tertinggi di antara provinsi lain di Sumatera. Bengkulu mengalami pertumbuhan dari 49.916,06 miliar rupiah pada 2022 menjadi 52.040,88 miliar rupiah pada 2023. Pertumbuhan ini sekitar 4,3%, menunjukkan ekonomi yang stabil.

PDRB Lampung naik dari 257.534,19 miliar rupiah pada 2022 menjadi 269.240,54 miliar rupiah pada 2023, dengan pertumbuhan sebesar 4,5%. PDRB Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 57.805,15 miliar rupiah pada 2022 menjadi 60.338,14 miliar rupiah pada 2023, dengan pertumbuhan sekitar 4,4%. Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari

190.163,70 miliar rupiah pada 2022 menjadi 200.043,86 miliar rupiah pada 2023, dengan pertumbuhan sekitar 5,2%.

Secara umum, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan PDRB dari 2022 ke 2023 dengan pertumbuhan berkisar antara 4% hingga 7%. Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan paling tinggi (7,7%), sedangkan provinsi lain seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau, dan Jambi juga mencatat pertumbuhan yang cukup kuat, lebih dari 5%. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya perkembangan ekonomi yang signifikan di berbagai provinsi di Sumatera, dengan kontribusi dari berbagai sektor ekonomi.

B. PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Tabel 4.5 PDRB Per Kapita Menurut Harga Koston (Ribu Rupiah) 2022-2023

Provinsi	PDRB Per Kapita Menurut Harga Koston (Ribu Rupiah) 2022-2023	
	2022	2023
Aceh	26.062	26.800
Sumatera Utara	37.781	39.140
Sumatera Barat	32.167	33.188
Riau	80.774	83.071
Jambi	44.515	86.007
Sumatera Selatan	39.719	41.278
Bengkulu	24.238	24.948
Lampung	27.974	28.907
Kep. Bangka Belitung	38.744	39.909
Kep. Riau	89.637	92.930

Sumber : BPS Indonesia (www.bps.go.id)

Berdasarkan data PDRB per kapita menurut harga konstan di atas untuk tahun 2022 dan 2023, berikut adalah beberapa analisis utama:

Pertumbuhan PDRB Per Kapita, semua provinsi di Sumatera mengalami pertumbuhan PDRB per kapita dari tahun 2022 ke 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah. Pertumbuhan PDRB per kapita dapat mengindikasikan perbaikan produktivitas atau peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Provinsi dengan PDRB Per Kapita Tertinggi, kepulauan Riau mencatat PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2022 (Rp 89.637 ribu) dan terus meningkat pada 2023 (Rp 92.930 ribu). Hal ini dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki ekonomi yang kuat, didukung oleh industri-industri besar seperti perkapalan, minyak, dan gas.

Riau dan Jambi juga memiliki angka PDRB per kapita yang signifikan, dengan Riau meningkat dari Rp 80.774 ribu (2022) menjadi Rp 83.071 ribu (2023), dan Jambi mengalami lonjakan signifikan dari Rp 44.515 ribu (2022) menjadi Rp 86.007 ribu (2023). Peningkatan drastis di Jambi bisa disebabkan oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu, seperti pertanian, pertambangan, atau investasi baru di provinsi tersebut.

Provinsi dengan PDRB Per Kapita Terendah, Bengkulu dan Aceh memiliki PDRB per kapita terendah, masing-masing sebesar Rp 24.238 ribu dan Rp 26.062 ribu pada tahun 2022. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023 (Rp 24.948 ribu dan Rp 26.800 ribu), perbedaan dengan provinsi lainnya masih cukup besar. Hal ini bisa disebabkan oleh sektor ekonomi yang kurang berkembang atau terbatasnya investasi di kedua provinsi tersebut.

Peningkatan Tertinggi, Jambi mengalami peningkatan tertinggi dalam PDRB per kapita, dengan kenaikan hampir dua kali lipat dari Rp 44.515 ribu (2022) menjadi Rp 86.007 ribu (2023). Ini adalah pertumbuhan yang luar biasa dan mungkin menunjukkan adanya perubahan ekonomi yang signifikan, seperti penemuan sumber daya alam baru atau investasi besar dalam infrastruktur dan industri.

Peningkatan Moderat. Sebagian besar provinsi lain mengalami peningkatan moderat di sekitar Rp 1.000 - Rp 2.000 ribu dari tahun 2022 ke 2023, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan ini bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun tidak ada perubahan besar yang mendadak.

Pertumbuhan Lampung, Lampung, yang memiliki fokus dalam pertanian dan perkebunan, juga mencatatkan peningkatan dari Rp 27.974 ribu (2022) menjadi Rp 28.907 ribu (2023), namun masih relatif lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di wilayah Sumatera. Ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor produktif di Lampung mungkin membutuhkan peningkatan lebih lanjut untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain yang lebih maju ekonominya.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Persentase pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2021 sebesar 3,18% mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 4,69% dengan kontribusi sebesar 22,04% ke pertumbuhan nasional. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi di Indonesiamasih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

Berikut laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2021-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Provinsi Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera 2021-2022

Provinsi	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera 2021-2022	
	2022	2023
Aceh	4,21	5.01
Sumatera Utara	4,33	4.23
Sumatera Barat	4,36	4.38
Riau	4,55	4.00
Jambi	4,75	4.00
Sumatera Selatan	5,15	4.07
Bengkulu	4,55	4.55
Lampung	9,12	4.66
Kep. Bangka Belitung	5,13	4.26
Kep. Riau	4,40	5.08

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2022 hingga 2023, berikut adalah beberapa analisis utama:

Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah pada 2023, Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, dengan laju sebesar 5,01%, meningkat dari 4,21% pada 2022. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Aceh sedang berkembang pesat, mungkin berkat peningkatan investasi atau sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif.

Lampung, yang pada 2022 memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 9,12%, mengalami penurunan drastis menjadi 4,66% pada 2023. Penurunan ini bisa menunjukkan bahwa setelah lonjakan pertumbuhan yang kuat pada 2022, pertumbuhan ekonomi Lampung melambat, mungkin karena faktor-faktor seperti ketidakstabilan sektor

pertanian atau komoditas. Provinsi dengan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa provinsi di Sumatera mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari 2022 ke 2023:

Sumatera Utara turun dari 4,33% (2022) ke 4,23% (2023).

Riau dan Jambi mengalami penurunan signifikan dari 4,55% dan 4,75% pada 2022 menjadi 4,00% pada 2023. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas (misalnya kelapa sawit atau minyak bumi), yang merupakan sektor penting di provinsi-provinsi ini.

Sumatera Selatan turun dari 5,15% menjadi 4,07%, yang menunjukkan pelemahan di beberapa sektor ekonomi atau mungkin akibat dari kurangnya investasi baru di provinsi tersebut.

Provinsi dengan Pertumbuhan Stabil atau Meningkat.

Aceh dan Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Aceh meningkat dari 4,21% (2022) ke 5,01% (2023), dan Kepulauan Riau meningkat dari 4,40% (2022) menjadi 5,08% (2023). Kepulauan Riau memiliki sektor ekonomi yang didominasi oleh perdagangan, jasa, serta industri, yang bisa menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ini.

Sumatera Barat mencatat sedikit peningkatan dari 4,36% pada 2022 menjadi 4,38% pada 2023, yang menunjukkan kestabilan ekonomi di wilayah tersebut.

Provinsi dengan Pertumbuhan yang Stabil, Bengkulu adalah provinsi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan laju yang

sama antara 2022 dan 2023 yaitu 4,55%. Ini menunjukkan tidak adanya fluktuasi besar dalam kegiatan ekonomi di provinsi ini.

Penurunan Ekonomi di Lampung, Pertumbuhan ekonomi Lampung menurun tajam dari 9,12% pada 2022 menjadi 4,66% pada 2023. Pertumbuhan yang sangat tinggi di tahun 2022 mungkin disebabkan oleh pemulihan setelah pandemi atau lonjakan sementara dalam sektor-sektor seperti pertanian dan perdagangan. Namun, penurunan ini bisa mengindikasikan bahwa lonjakan tersebut tidak berkelanjutan, dan ekonomi Lampung kembali ke tingkat pertumbuhan yang lebih normal.

Pertumbuhan di Atas dan di Bawah Rata-Rata, Kepulauan Riau dan Aceh berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi, dengan lebih dari 5% pada 2023. Sebaliknya, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat, mendekati atau sedikit di atas 4%.

D. Infasi

Inflasi adalah proses peningkatnya harga secara umum dan terus menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor. Inflasi dapat diukur dengan Indeks Harga konsumen (IHK) dan Deflator PDB. Inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatan juga menurun. Inflasi Pulau Sumatera pada tahun 2021 sebesar 2,27 persen mengalami kenaikan menjadi 5,44 % pada tahun 2022. Hal ini masih lumayan jauh dari inflasi Nasional tahun 2022 sebesar 5,51. Infasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 2.61% secara tahunan. Berikut merupakan inflasi dari setiap Provinsi di

pulau Sumatera Tahun 2023.

Tabel 4.7 Persentase tingkat Inflasi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2023

Provinsi	Persentase Tingkat Inflasi Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera 2021-2022	
	2021	2022
Aceh	4,70	5.5
Sumatera Utara	5,61	5.1
Sumatera Barat	7,43	2.50
Riau	7,04	5.12
Jambi	6,35	5.04
Sumatera Selatan	5,94	2.65
Bengkulu	6,03	3.09
Lampung	5,51	3.17
Kep. Bangka Belitung	6,67	3.47
Kep. Riau	5,83	2.61

Sumber : Badan pusat Statistik (www.bps.go.id)

Dari tahun 2014 hingga 2016, Gini Coefficient mengalami peningkatan dari 0.331 menjadi 0.358. Ini menunjukkan bahwa selama periode ini, ketimpangan pendapatan di Lampung meningkat, yang bisa diartikan bahwa distribusi kekayaan lebih tidak merata. Dari tahun 2017 hingga 2022, terdapat tren penurunan Gini Coefficient yang cukup signifikan, dari 0.333 pada tahun 2017 menjadi 0.313 di 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Lampung, yang mengindikasikan kebijakan pemerintah atau faktor ekonomi lainnya yang membantu mengurangi kesenjangan pendapatan di wilayah ini. Pada tahun 2023, Gini Coefficient sedikit meningkat menjadi 0.324 setelah penurunan selama beberapa tahun sebelumnya. Ini bisa menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan ekonomi di tahun tersebut, meskipun masih lebih rendah dibandingkan puncaknya di 2016.

E. Gini ratio

Gini rasio adalah suatu alat ukur atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Gini Rasio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila gini Rasio mendekati 0 menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. (Todaro,2000)

Tabel 4.8 Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah Yang Ada Di Pulau Sumatera tahun 2023

Provinsi	Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah		
	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan
Aceh	0,265	0,318	0,296
Sumatera Utara	0,242	0,340	0,309
Sumatera Barat	0,232	0,305	0,280
Riau	0,274	0,369	0,324
Jambi	0,320	0,365	0,343
Sumatera Selatan	0,305	0,360	0,338
Bengkulu	0,283	0,386	0,333
Lampung	0,287	0,359	0,324
Kep. Bangka Belitung	0,202	0,265	0,245
Kep. Riau	0,248	0,339	0,340

Sumber : Badan Pusat statistik (<https://www.bps.go.id>)

Dapat dilihat dari tabel 4.8 berdasarkan data ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi di pulau sumatera bervariasi. Provinsi dengan gini rasio tertinggi berada pada provinsi Jambi dengan nilai 0.343 sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan nilai 0.245. Ketimpangan

distribusi pendapatan pulau sumatera lebih signifikan di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, dengan beberapa provinsi mengalami ketimpangan yang lebih merata dibandingkan dengan yang lain. Analisis ini dapat membantu dalam meruuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan, terutama di daerah perkotaan.

4.1.2 Kondisi Sosial

A. Kemiskinan

1) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Rata – rata tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2021 sebesar 10,22 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 9,47 persen. Berikut persentase tingkat kemiskinan menurut Provinsi yang ada di Pulausumatera:

Tabel 4.9 Provinsi Presentase Tingkat Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumkatera Tahun 2022-2023

Provinsi	Persentase Tingkat Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera 2021-2022	
	2022	2023
Aceh	14,75	14.45
Sumatera Utara	8,33	8.15
Sumatera Barat	6,04	5.95
Riau	6,48	6.68
Jambi	7,62	7.58
Sumatera Selatan	11,95	11.78
Bengkulu	14,34	14.04
Lampung	11,44	11.11
Kep. Bangka Belitung	4,61	4.52
Kep. Riau	6,03	5.69

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>) -

Menurut Tabel diatas tingkat kemiskinan di provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sebagian besar provinsi di Sumatera mengalami penurunan tingkat kemiskinan dari 2022 ke 2023, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, peningkatan kegiatan ekonomi, dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Provinsi-provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan cukup konsisten antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi, Aceh tetap memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, meskipun mengalami penurunan dari 14,75% (2022) menjadi 14,45% (2023). Penurunan ini mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi di Aceh, tetapi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi menunjukkan bahwa Aceh menghadapi tantangan besar dalam hal pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Bengkulu juga mencatat tingkat kemiskinan yang tinggi, menurun dari 14,34% menjadi 14,04%. Provinsi ini juga perlu fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi.

Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Terendah, Kepulauan Bangka Belitung terus mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Sumatera. Angkanya menurun sedikit dari 4,61% (2022) menjadi 4,52% (2023), menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil dan maju, dengan sektor industri dan pertambangan yang menjadi penopang utama ekonomi.

Kepulauan Riau juga mencatat tingkat kemiskinan yang rendah, menurun dari 6,03% pada 2022 menjadi 5,69% pada 2023. Sektor perdagangan dan industri di Kepulauan Riau menjadi faktor penting yang menopang ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Provinsi dengan Perubahan Signifikan, Lampung mencatat penurunan yang stabil dalam tingkat kemiskinan, dari 11,44% pada 2022 menjadi 11,11% pada 2023. Lampung, dengan basis pertanian yang kuat, tampaknya berhasil menjaga tingkat kemiskinan tetap menurun meskipun menghadapi tantangan di sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sumatera Selatan juga mengalami penurunan yang stabil, dari 11,95% menjadi 11,78%, mencerminkan tren perbaikan yang lambat tapi positif di wilayah ini.

Provinsi dengan Kenaikan Tingkat Kemiskinan, Riau adalah satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, dari 6,48% (2022) menjadi 6,68% (2023). Kenaikan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan harga komoditas utama, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan minyak bumi, yang menjadi andalan ekonomi Riau. Fluktuasi harga komoditas global mungkin mempengaruhi daya beli masyarakat dan menambah jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Relatif Stabil, Jambi mencatat sedikit penurunan dari 7,62% pada 2022 menjadi 7,58% pada 2023, menunjukkan kestabilan ekonomi yang relatif baik meskipun tidak ada perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga mengalami penurunan yang minimal tetapi stabil, yang mengindikasikan adanya

perkembangan yang lambat dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2) Garis kemiskinan

Garis kemiskinan atau batasan kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi suatu negara. Berikut merupakan garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun 2022-2023:

Tabel 4.10 Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan) Menurut Provinsi Di Provinsi Sumatera Tahun 2022-2023

	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	
	2022	2023
Aceh	579.227,00	612.007.00
Sumatera Utara	561.004,00	573.500.00
Sumatera Barat	610.941,00	652.709.00
Riau	605.912,00	632.704.00
Jambi	545.870,00	552.720.00
Sumatera Selatan	548.455,00	500.688.00
Bengkulu	590.754,00	609.241.00
Lampung	514.039,00	534.575.00
Kep. Bangka Belitung	622.000,07	893.830.00
Kep. Riau	605.912,00	708.168.00

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>) -

Sebagian besar provinsi di Sumatera mengalami peningkatan garis kemiskinan dari 2022 ke 2023. Ini mencerminkan kenaikan biaya hidup yang dihadapi oleh penduduk, terutama akibat inflasi atau kenaikan harga-harga komoditas utama. Aceh mengalami peningkatan garis kemiskinan dari Rp 579.227,00 (2022) menjadi Rp 612.007,00 (2023), yang menunjukkan bahwa penduduk di Aceh memerlukan pendapatan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Provinsi dengan Peningkatan Garis Kemiskinan Terbesar, Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan signifikan dalam garis kemiskinan, dari

Rp 622.000,07 (2022) menjadi Rp 893.830,00 (2023). Kenaikan tajam ini mungkin disebabkan oleh inflasi yang lebih tinggi di provinsi tersebut atau kenaikan biaya hidup yang drastis, seperti peningkatan harga kebutuhan pokok, perumahan, atau transportasi.

Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan yang besar, dari Rp 605.912,00 (2022) menjadi Rp 708.168,00 (2023). Kenaikan ini bisa terkait dengan biaya hidup yang lebih tinggi di wilayah yang berkembang secara industri dan perdagangan, yang umumnya memerlukan biaya hidup yang lebih tinggi.

Provinsi dengan Peningkatan Garis Kemiskinan Moderat, Sumatera Barat mengalami peningkatan dari Rp 610.941,00 (2022) menjadi Rp 652.709,00 (2023). Peningkatan ini mungkin mencerminkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok di wilayah tersebut, yang mempengaruhi garis kemiskinan.

Riau juga mengalami peningkatan garis kemiskinan dari Rp 605.912,00 pada 2022 menjadi Rp 632.704,00 pada 2023, meskipun peningkatannya lebih moderat dibandingkan Kepulauan Riau dan Bangka Belitung.

Provinsi dengan Peningkatan Garis Kemiskinan Kecil, Sumatera Utara mengalami kenaikan yang relatif kecil, dari Rp 561.004,00 (2022) menjadi Rp 573.500,00 (2023), menunjukkan bahwa inflasi atau kenaikan harga-harga kebutuhan dasar di provinsi ini lebih terkendali dibandingkan di wilayah lain. Jambi juga mencatat kenaikan yang kecil, dari Rp 545.870,00 menjadi Rp 552.720,00, menunjukkan bahwa tingkat inflasi atau kenaikan biaya hidup di provinsi ini relatif stabil.

Provinsi dengan Penurunan Garis Kemiskinan, Sumatera Selatan adalah satu-satunya provinsi yang mencatat penurunan garis kemiskinan, dari Rp

548.455,00 pada 2022 menjadi Rp 500.688,00 pada 2023. Penurunan ini sangat tidak biasa, mengingat sebagian besar provinsi mengalami kenaikan. Ini mungkin menunjukkan penurunan biaya hidup di wilayah tersebut atau adanya intervensi kebijakan yang berhasil menurunkan harga-harga kebutuhan dasar.

Provinsi dengan Garis Kemiskinan Tertinggi, Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi pada 2023 dengan Rp 893.830,00, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pesat biaya hidup di wilayah tersebut, terutama karena sektor ekonomi seperti pertambangan dan industri yang mempengaruhi harga-harga barang dan jasa. Kepulauan Riau berada di posisi kedua dengan garis kemiskinan sebesar Rp 708.168,00 pada 2023, yang juga mencerminkan kenaikan biaya hidup yang signifikan.

Provinsi dengan Garis Kemiskinan Terendah, Lampung tetap menjadi provinsi dengan garis kemiskinan terendah di Pulau Sumatera, meskipun mengalami kenaikan dari Rp 514.039,00 (2022) menjadi Rp 534.575,00 (2023). Ini menunjukkan bahwa biaya hidup di Lampung relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain, mungkin karena faktor-faktor seperti harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau dan infrastruktur yang masih berkembang.

3) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Rata-rata indeks kedalaman kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2021 adalah sebesar 1,56 persen di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,43 persen.

Tabel 4.11 Persentase Indeks kedalaman kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023

Provinsi	Persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	
	2022	2023
Aceh	2,90	2.76
Sumatera Utara	1,41	1.26
Sumatera Barat	0,86	0.82
Riau	0,97	1.00
Jambi	1,19	1.19
Sumatera Selatan	1,79	1.72
Bengkulu	2,17	2.14
Lampung	1,70	1.64
Kep. Bangka Belitung	0,43	0.63
Kep. Riau	0,89	0.82

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Provinsi dengan Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Aceh mengalami penurunan dari 2,90 menjadi 2,76 pada 2023, meskipun masih memiliki indeks tertinggi di Pulau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Aceh cukup tinggi, kedalaman kemiskinannya berkurang. Artinya, meski banyak penduduk masih miskin, jarak pengeluaran mereka dengan garis kemiskinan semakin kecil.

Sumatera Utara mencatat penurunan dari 1,41 menjadi 1,26. Ini menunjukkan bahwa, selain berhasil menurunkan persentase kemiskinan, kedalaman kemiskinan juga berkurang, yang merupakan sinyal positif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sumatera Barat juga mengalami penurunan dari 0,86 menjadi 0,82, menunjukkan stabilitas dalam memperbaiki kondisi ekonomi penduduk miskin. Kedalaman kemiskinan di Sumatera Barat relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Sumatera Selatan dan Lampung mencatat penurunan yang relatif kecil, masing-masing dari 1,79 menjadi 1,72 dan dari 1,70 menjadi 1,64, yang

menunjukkan bahwa kemiskinan di kedua provinsi ini sedikit berkurang dalam hal kedalamannya.

B. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Berikut dibawah ini perkembangan IPM menurut Provinsi yang ada di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 4.12 Persentase perkembangan manusia Menurut Provisinsi di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2022-2023	
	2022	2023
Aceh	72,80	73.4
Sumatera Utara	72,71	73.37
Sumatera Barat	73,26	73.75
Riau	73,52	74.04
Jambi	72,14	72.77
Sumatera Selatan	70,90	71.62
Bengkulu	72,16	72.78
Lampung	70,45	71.15
Kep. Bangka Belitung	72,24	72.85
Kep. Riau	76,46	77.11

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Peningkatan IPM di semua provinsi ialah setiap Provinsi di pulau sumatera menunjukan peningkatan ipm dari tahun 2022 sampai 2023, hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan di wilayah tersebut. Kepulauan riau memiliki ipm tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 77.11 yang menunjukkan bahwa Provinsi ini memiliki kualitas pembangunan manusia yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Bengkulu memiliki ipm

terendah pada tahun 2023 dengan nilai 71.62.

Secara keseluruhan data ini menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia di seluruh Provinsi pulau Sumatera, dengan laju pertumbuhan yang berbeda-beda.

C. Rata – rata Lama Sekolah

Tabel 4.13 Rata-Rata lama Sekolah Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi di pulau Sumatera tahun 2022-2023

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur \geq 15 Tahun Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	
	2022	2023
Aceh	9,79	9.89
Sumatera Utara	9,99	10.07
Sumatera Barat	9,51	9.59
Riau	9,54	9.60
Jambi	9,07	9.16
Sumatera Selatan	8,82	8.90
Bengkulu	9,28	9.35
Lampung	8,61	8.72
Kep.Bangka Belitung	8,57	8.66
Kep. Riau	10,46	10.52

Sumber: BPS Indonesia (<https://www.bps.go.id>)

Sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2022 ke 2023. Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan di wilayah tersebut. Aceh mengalami peningkatan dari 9,79 menjadi 9,89, menunjukkan sedikit perbaikan dalam lama pendidikan penduduk. Meskipun meningkat, angka ini masih menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk di Aceh perlu ditingkatkan lebih lanjut.

Provinsi dengan Peningkatan Terbesar, Kepulauan Riau memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan juga mengalami peningkatan dari 10,46 menjadi

10,52. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di provinsi ini sangat baik dan terus meningkat, mencerminkan akses yang baik ke pendidikan berkualitas. Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan yang positif, dari 9,99 menjadi 10,07. Ini menunjukkan bahwa penduduk di provinsi ini semakin mengakses pendidikan lebih lama dan mungkin memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik.

4.2 Analisis Pembahasan Tujuan Penelitian

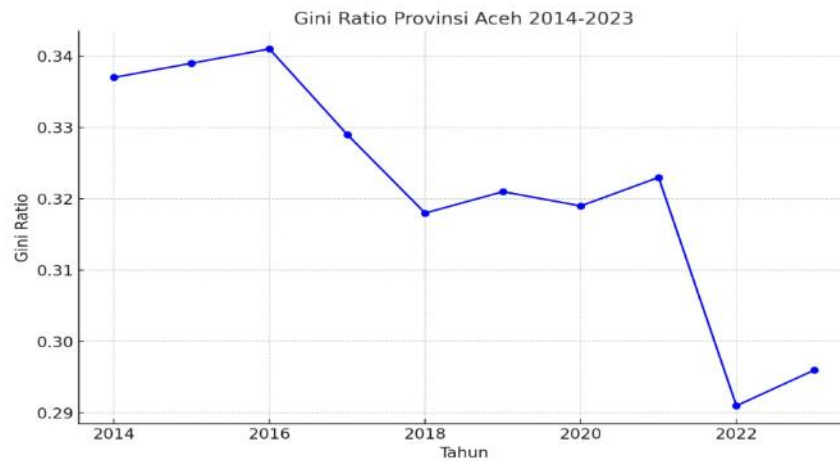
4.2.1 Analisis Ekonomi deskriptif Mengenai Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014 sampai 2023.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia terkhususnya di Pulau Sumatera yang termasuk kedalam jumlah penduduk terpadat nomor 2 di Indonesia maka kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Ketimpangan distribusi pendapatan memiliki peranan penting terhadap kesejahteraan masyarakat, karena distribusi pendapatan yang merata atau tidak langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Ketika pendapatan didistribusikan secara lebih merata, lebih banyak orang dapat menikmati manfaat ekonomi, meningkatkan standar hidup mereka, dan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan makmur. Sebaliknya, ketimpangan yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperburuk kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Distribusi pendapatan yang adil tidak hanya penting untuk kesejahteraan individual, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Berikut data Gini Provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2014-2023



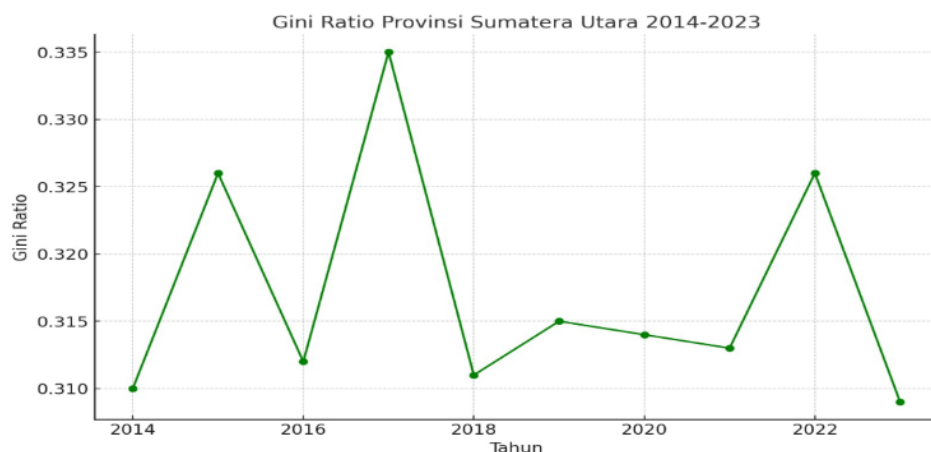
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.2 Koefisien Gini provinsi Aceh (2014-2023)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perubahan koefisien Gini Provinsi Aceh dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan pola fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan. Dari 2014 (0,337) hingga 2023 (0,296), ada tren penurunan koefisien Gini. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Aceh secara keseluruhan mengalami perbaikan, terutama setelah tahun 2021. Fluktuasi Kecil (2014–2021): Antara 2014 dan 2021, Gini Ratio mengalami fluktuasi kecil namun tetap relatif stabil di sekitar angka 0,32 hingga 0,34. Ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan selama periode ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Penurunan Signifikan di 2022: Pada 2022, terlihat penurunan yang signifikan ke 0,291, yang merupakan angka terendah selama periode yang diamati. Ini menunjukkan adanya perbaikan

substansial dalam distribusi pendapatan di Aceh pada tahun tersebut. Sedikit Kenaikan di 2023: Pada 2023, koefisien Gini naik sedikit menjadi 0,296, yang masih merupakan angka rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ketimpangan sedikit meningkat, kondisinya masih lebih baik dibandingkan sebelum 2022.

Secara keseluruhan, tren penurunan dalam koefisien gini mencerminkan adanya usaha atau faktor yang berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di aceh, terutama sejak tahun 2022. Namun fluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tantangan dalam distribusi pendapatan masih ada



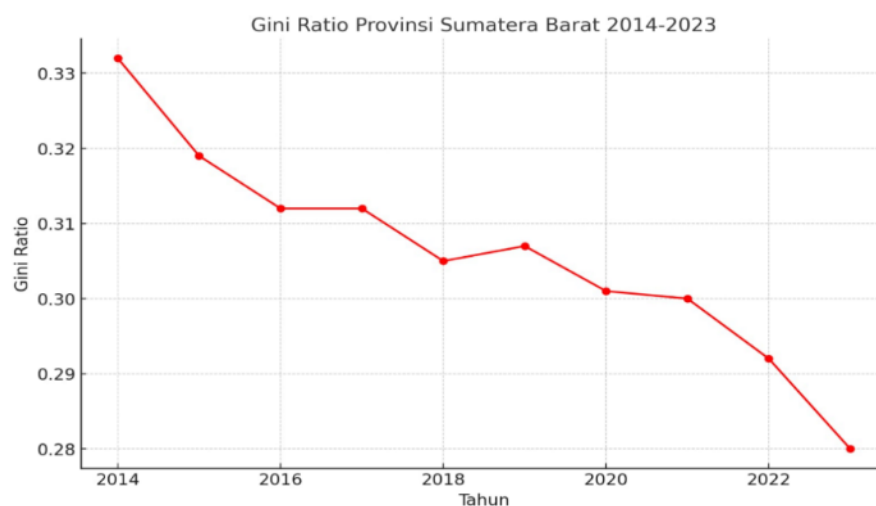
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.3 Koefisien Gini provinsi Sumatera Utara (2014-2023)

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan perubahan koefisien Gini Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014-2023. Secara keseluruhan, data menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, tanpa tren penurunan atau kenaikan yang konsisten. Ketimpangan pendapatan terlihat mengalami naik-turun yang relatif sering selama periode ini. Puncak Ketimpangan pada 2017 dan 2022 Koefisien Gini mencapai puncaknya

pada tahun 2017 di angka 0,335, yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi di tahun tersebut. Kemudian, setelah mengalami penurunan, Gini Ratio kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai angka 0,326. Penurunan Ketimpangan pada 2023, Gini Ratio menurun menjadi 0,309, yang merupakan angka terendah setelah beberapa tahun fluktuasi. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Sumatera Utara pada tahun tersebut. Stabilitas Setelah 2018 mulai dari tahun 2018 hingga 2021, Gini Ratio berada di kisaran yang relatif stabil di angka 0,311 hingga 0,315. Hal ini menandakan adanya kondisi ketimpangan yang tidak terlalu berubah drastis dalam periode tersebut.

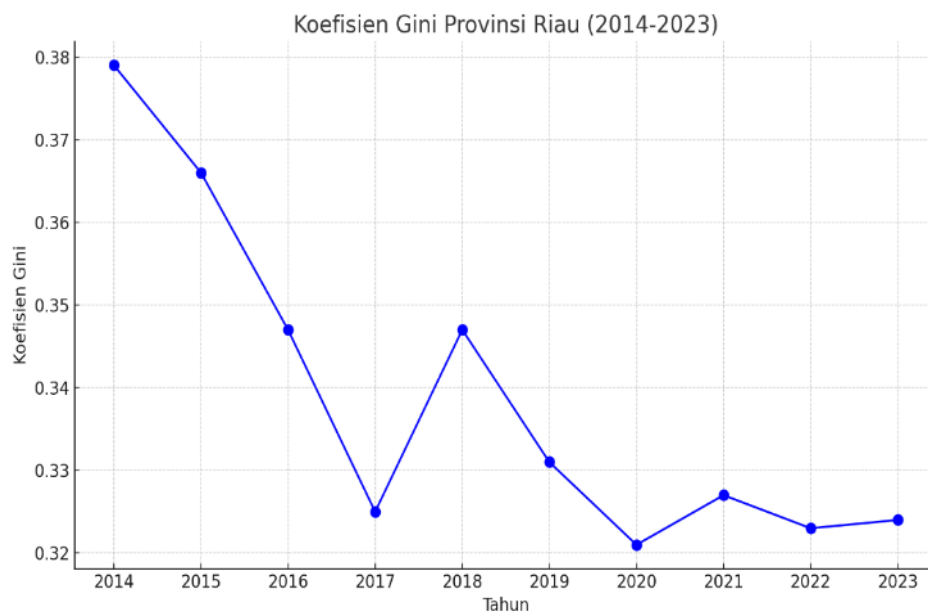
Secara keseluruhan, grafik ini mebcerminkan ketimpangan di Sumatera Utara bervariasi dari tahun ke tahun, dengan upaya atau faktor-faktor yang kemungkinan membantu menurunkan ketimpangan pada tahun 2023. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor eksternal lainnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.4 Koefisien Gini provinsi Sumatera Barat (2014-2023)

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan perubahan koefisien Gini Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2023. Grafik menunjukkan adanya penurunan yang konsisten dalam koefisien Gini dari tahun 2014 hingga 2023, dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2023, mencapai 0,280. Ini mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan di provinsi tersebut. Dari tahun 2014 hingga 2017, Gini Ratio relatif stabil, berkisar antara 0,312 hingga 0,332. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan yang drastis selama periode tersebut. Ada sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 0,307, tetapi tidak bertahan lama, karena kembali turun di tahun-tahun berikutnya. Penurunan terus-menerus setelah tahun 2019 menunjukkan adanya usaha atau faktor-faktor yang mungkin berkontribusi dalam memperbaiki distribusi pendapatan, dengan angka terendah di tahun 2023.

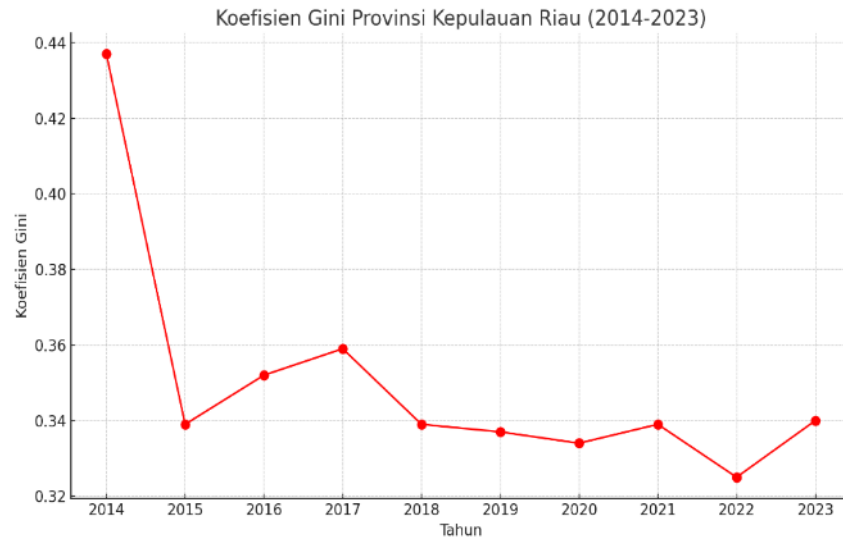


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.5 Koefisien Gini Provinsi Riau (2014-2023)

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan koefisien gini Provinsi Riau tahun 2014-2023. Pada tahun 2014, koefisien Gini cukup tinggi di angka 0,379, yang menandakan ketimpangan pengeluaran yang lebih besar. Namun, pada 2015, terjadi penurunan signifikan menjadi 0,366, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan atau pengeluaran. Pada 2016, angka Gini kembali turun menjadi 0,347 dan menurun lebih jauh pada 2017 hingga 0,325. Ini adalah salah satu periode dengan ketimpangan terendah selama dekade tersebut. Pada tahun 2018, koefisien Gini kembali meningkat ke 0,347, menandakan peningkatan ketimpangan setelah penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 - 2020 terjadi penurunan lagi, dengan koefisien Gini pada 2019 sebesar 0,331 dan turun ke 0,321 pada 2020. Hal ini mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan atau pengeluaran di masyarakat. Dari 2021 hingga 2023, angka Gini stabil di sekitar 0,327, 0,323, dan 0,324. Fluktuasi ini kecil, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran cenderung tetap stabil dalam periode ini.

Secara umum, koefisien Gini di Riau menunjukkan tren penurunan dari 2014 hingga 2020, yang berarti ada perbaikan dalam distribusi pengeluaran. Namun, dari 2021 hingga 2023, angka Gini cenderung stabil, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran tidak banyak berubah dan berada di tingkat sedang.

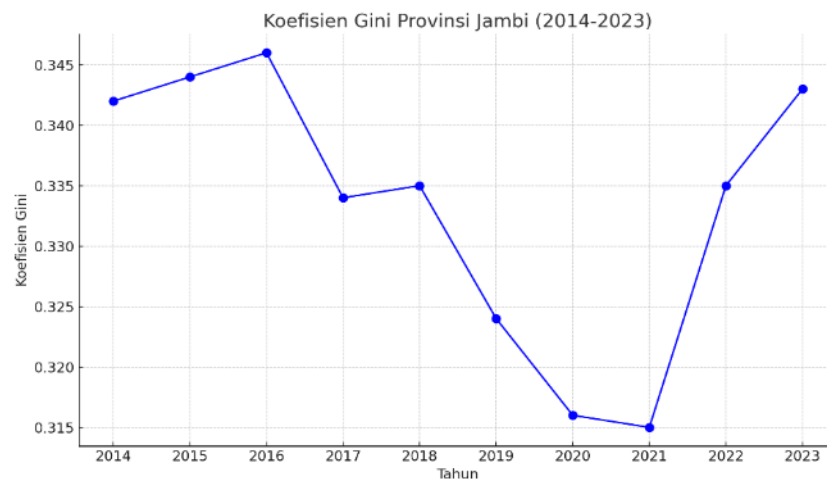


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.5 Koefisien Gini Provinsi Kep. Riau (2014-2023)

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Riau tahun 2014-2023. Pada tahun 2014 Koefisien Gini tertinggi pada 0,437, menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang cukup besar. Pada tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan ke 0,339, menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Pada tahun 2016-2017 angka Gini menunjukkan fluktuasi kecil, dengan sedikit peningkatan ke 0,359 pada 2017. Pada tahun 2018-2019 Koefisien Gini stabil di kisaran 0,339 hingga 0,337, menunjukkan stabilitas ketimpangan, pada tahun 2020-2021 ada penurunan kecil ke 0,334, diikuti dengan sedikit peningkatan kembali ke 0,339 pada 2021. Pada tahun 2022 angka menurun ke 0,325, menandakan perbaikan lebih lanjut dalam distribusi pengeluaran, dan kembali meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 0,34, menunjukkan stabilitas ketimpangan pada tingkat sedang.

Grafik ini mencerminkan dinamika ketimpangan pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau selama hampir satu dekade, dengan adanya usaha untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah tersebut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.6 Koefisien Gini Provinsi Jambi (2014-2023)

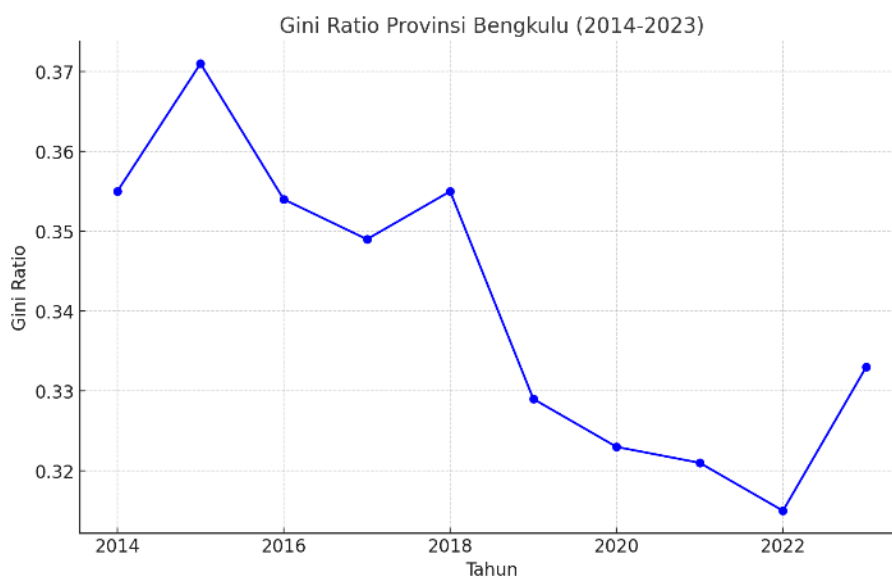
Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Jambi tahun 2014-2023. Pada tahun 2014, koefisien Gini menunjukkan adanya ketimpangan yang relatif rendah. Masyarakat Jambi menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015 terdapat sedikit peningkatan ketimpangan. Meskipun masih dalam kisaran yang relatif aman, ini menunjukkan bahwa ada kelompok dengan pendapatan yang mulai tidak merata. Kenaikan berlanjut pada tahun 2016, menandakan bahwa ketimpangan mulai meningkat. Masyarakat yang lebih kaya mungkin memperoleh lebih banyak pendapatan, sementara yang miskin tidak mendapatkan pertumbuhan yang sebanding.

Penurunan terjadi pada tahun ini 2017 menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam distribusi pendapatan. Program-program sosial dan kebijakan pemerintah mungkin mulai berpengaruh positif terhadap pengurangan ketimpangan. Pada tahun 2018 angka Gini sedikit meningkat kembali. Meskipun masih menunjukkan ketimpangan yang lebih baik dibandingkan tahun 2015 dan 2016, namun ada indikasi bahwa pengurangan ketimpangan tidak berlangsung konsisten. Pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan, mencapai titik terendah sejak 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jambi semakin mendekati distribusi pendapatan yang lebih adil, dengan banyak individu di lapisan bawah mendapatkan akses lebih baik terhadap pendapatan. Ketimpangan terus berkurang pada tahun 2020, menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dan program-program kesejahteraan mungkin efektif dalam membantu masyarakat berpendapatan rendah. Pada tahun 2021 Koefisien Gini mencapai nilai terendahnya di 0,315. Ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam pemerataan pendapatan, dengan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Ada sedikit peningkatan dalam ketimpangan pada tahun 2022, menunjukkan bahwa mungkin ada tantangan baru yang dihadapi oleh pemerintah dalam mempertahankan pemerataan pendapatan. Hal ini bisa disebabkan oleh inflasi, dampak ekonomi global, atau faktor lainnya. Dan pada tahun 2023 nilai Gini meningkat lagi, menandakan bahwa ketimpangan mulai meningkat kembali. Ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata dan beberapa

kelompok mungkin mengalami kesulitan lebih besar.

Secara keseluruhan, koefisien Gini Jambi menunjukkan fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan selama periode 2014-2023. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan antara 2019 dan 2021, ada indikasi bahwa ketimpangan kembali meningkat pada tahun-tahun terakhir.



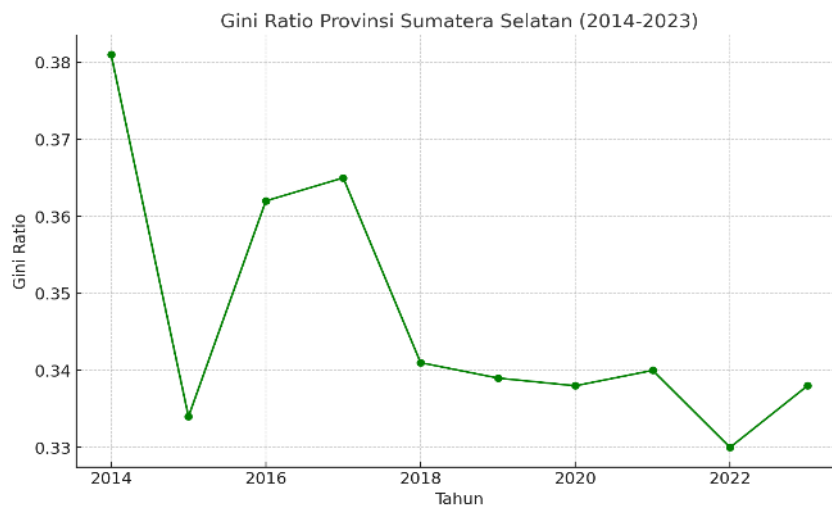
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.7 Koefisien Gini Provinsi Bengkulu (2014-2023)

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Bengkulu tahun 2014-2023. Puncak Ketimpangan terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 0,371, menunjukkan distribusi pendapatan yang paling tidak merata di periode tersebut. Penurunan Ketimpangan terlihat mulai tahun 2016 hingga 2021, di mana nilai Gini Ratio secara umum cenderung menurun, mencerminkan upaya perbaikan distribusi pendapatan. Fluktuasi terakhir terjadi setelah penurunan pada tahun 2022

0,315, nilai Gini Ratio meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,333, yang menunjukkan ketimpangan sedikit meningkat kembali.

Secara keseluruhan, tren jangka panjang di Bengkulu menunjukkan penurunan ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan 2015, meskipun masih ada fluktuasi di beberapa tahun terakhir.

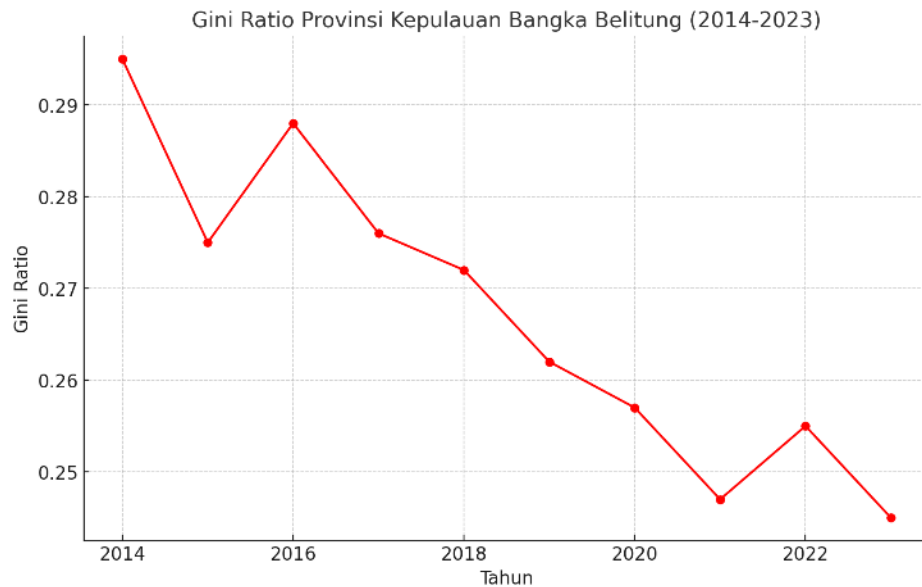


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.8 Koefisien Gini Provinsi Sumatera Selatan (2014-2023)

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2023. Pada tahun 2014 mencatat ketimpangan tertinggi dengan nilai 0,381, yang menunjukkan distribusi pendapatan paling tidak merata di periode ini. Penurunan tajam terlihat pada 2015 dengan nilai 0,334, yang mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan setelah 2014. Fluktuasi Ketimpangan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan sedikit peningkatan pada 2016 dengan nilai 0,362 dan 2017 dengan nilai 0,365, lalu kembali turun setelahnya. Stabilitas mulai tahun 2019 hingga 2023, dengan Gini Ratio berkisar

antara 0,33 hingga 0,34, menunjukkan ketimpangan yang relatif stabil.



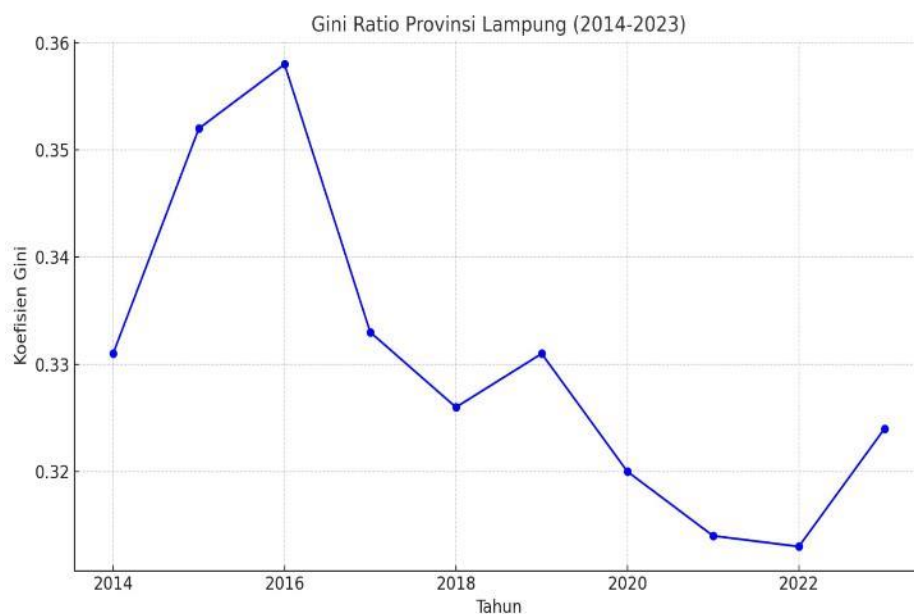
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.9 Koefisien Gini Provinsi Kep. Bangka Belitung (2014-2023)

Berdasarkan grafik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2014-2023. Pada tahun 2014 Gini Ratio sebesar 0,295 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 terjadi penurunan kedua dengan nilai 0,275 menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Pada tahun 2016-2021 rentang nilai Gini menunjukkan tren penurunan dari 0,288 di 2016 hingga mencapai 0,247 pada 2021. Ini mencerminkan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan distribusi pendapatan. Dan pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan ke 0,255, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kestabilan distribusi pendapatan. Pada tahun 2023 nilai Gini Ratio kembali turun ke 0,245, mencerminkan keberhasilan dalam menanggulangi ketimpangan

pendapatan.

Secara keseluruhan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kemajuan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dari 2014 hingga 2023, meskipun tetap harus waspada terhadap fluktuasi di tahun tertentu. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjadi kunci untuk mempertahankan tren positif ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 4.10 Koefisien Gini Provinsi Lampung (2014-2023)

Berdasarkan garfik diatas menggambarkan perubahan Koefisien Gini Provinsi Lampung tahun 2014-2023. Peningkatan di awal periode 2014-2016 Gini Ratio meningkat dari 0,331 pada 2014 menjadi 0,358 pada 2016. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan sedikit meningkat selama periode ini. Penurunan setelah 2016 Setelah mencapai puncaknya pada 2016, Gini Ratio menurun hingga 0,326 pada 2018, yang

mencerminkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Stabil dan sedikit menurun pada tahun 2018-2022 selama periode 2018-2022, Gini Ratio relatif stabil, meskipun terjadi sedikit penurunan, hingga mencapai titik terendah pada 2022 dengan nilai 0,313. Kenaikan kecil di 2023, Gini Ratio kembali sedikit meningkat menjadi 0,324. Hal ini mungkin menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi, distribusi pendapatan di Lampung tidak mengalami perubahan yang drastis, dan secara umum cenderung menunjukkan stabilitas di akhir periode.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

1. Pemilihan Model Terbaik

Tabel 4.14 Hasil Regresi Ordinary Least Square (OLS)

Dependent Variable: GR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/30/24 Time: 18:39

Sample: 2014 2023

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.883156	0.903957	7.614475	0.0000
PDRB	0.022995	0.031507	0.729841	0.4673
TPT	-0.030058	0.025521	-1.177788	0.2418
K	0.018749	0.010790	1.737676	0.0855
IPM	-1.958029	0.253162	-7.734297	0.0000

Effects Specification

S.D.

Rho

Cross-section random	0.074098	0.7961	
Idiosyncratic random	0.037494	0.2039	
Weighted Statistics			
Root MSE	0.037946	R-squared	0.467549
Mean dependent var	-0.178144	Adjusted R-squared	0.445131
S.D. dependent var	0.052265	S.E. of regression	0.038932
Sum squared resid	0.143989	F-statistic	20.85508
Durbin-Watson stat	1.477863	Prob(F-statistic)	0.000000
Unweighted Statistics			
R-squared	-0.186944	Mean dependent var	-1.127467
Sum squared resid	0.982151	Durbin-Watson stat	0.216664

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi menggunakan model ekonometrika menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Gini Ratio* (GR). Sedangkan variabel Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel *Gini Ratio* (GR).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan sering kali tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi pendapatan, menyebabkan ketimpangan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat meningkatkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, sementara manfaat pertumbuhan tidak selalu dirasakan secara merata. Ketimpangan ini berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan dan menciptakan ketidakstabilan sosial, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil.

Tabel 4.15 Hasil Regresi Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/13/24 Time: 14:03
 Sample: 2014 2023
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.584409	0.116063	5.035282	0.0000
PDRB	4.28E-08	2.47E-08	1.734600	0.0861
TPT	0.003968	0.002056	1.929727	0.0566
K	-7.25E-06	9.72E-06	-0.746109	0.4574
IPM	-0.004024	0.001675	-2.402102	0.0182
Root MSE	0.027451	R-squared		0.096620
Mean dependent var	0.325170	Adjusted R-squared		0.058583
S.D. dependent var	0.029028	S.E. of regression		0.028165
Akaike info criterion	-4.252795	Sum squared resid		0.075358
Schwarz criterion	-4.122536	Log likelihood		217.6397
Hannan-Quinn criter.	-4.200077	F-statistic		2.540152
Durbin-Watson stat	0.391386	Prob(F-statistic)		0.044794

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Tabel 4.16 Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/13/24 Time: 14:03
 Sample: 2014 2023
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.104682	0.103001	10.72501	0.0000
PDRB	1.54E-07	8.31E-08	1.857274	0.0667
TPT	-0.002034	0.001606	-1.266325	0.2088
K	7.57E-06	1.03E-05	0.734819	0.4644
IPM	-0.011343	0.001627	-6.969989	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.012163	R-squared		0.822659
Mean dependent var	0.325170	Adjusted R-squared		0.795851
S.D. dependent var	0.029028	S.E. of regression		0.013116
Akaike info criterion	-5.700863	Sum squared resid		0.014793
Schwarz criterion	-5.336139	Log likelihood		299.0431
Hannan-Quinn criter.	-5.553252	F-statistic		30.68776
Durbin-Watson stat	1.806758	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Tabel 4.17 Hasil Uji Chow Pada Model FEM

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.977919	(9,86)	0.0000
Cross-section Chi-square	177.771021	9	0.0000

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Karena nilai probability dari Cros-section F dan Cross-Section Chi-Square $0.0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, dan selanjutnya akan dilakukan pengujian Hausman pada model REM.

Tabel 4.18 Hasil Uji Hausman Pada Model REM

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		Prob.
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	
Cross-section random	7.581421	4	0.1082

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Uji Hausman diartikan sebagai pengujian untuk memilih model yang terbaik yaitu antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Uji Hausman atau yang sering disebut dengan istilah Hausman Test adalah uji yang digunakan untuk menentukan metode yang terbaik antara fixed effect ataukah random effect. Dalam kesempatan ini akan kita bahas bagaimana cara melakukan Hausman Test dengan Eviews Dalam Regresi Data Panel. Uji *Hausman* bertujuan untuk menentukan model yang terbaik antara pendekatan efek acak (*random effect*) dan metode efek tetap (*fixed effect*) yang sebaiknya

dilakukan dalam pemodelan data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *hausman* dilihat dari nilai *probability cross-section random* (Widarjono, 2009).

Karena nilai *probability* dari *Cros-section F* dan *Cross-Section Chi-Square* $0.1082 > 0,05$ maka H_0 ditolak, dan model terbaik yang kita pilih dan digunakan dalam persamaan di pengolahan data ini adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4.19 Hasil Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: GR

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 09/30/24 Time: 18:39

Sample: 2014 2023

Periods included: 10

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 100

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.883156	0.903957	7.614475	0.0000
PDRB	0.022995	0.031507	0.729841	0.4673
TPT	-0.030058	0.025521	-1.177788	0.2418
K	0.018749	0.010790	1.737676	0.0855
IPM	-1.958029	0.253162	-7.734297	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.074098	0.7961
Idiosyncratic random	0.037494	0.2039

Weighted Statistics

Root MSE	0.037946	R-squared	0.467549
Mean dependent var	-0.178144	Adjusted R-squared	0.445131
S.D. dependent var	0.052265	S.E. of regression	0.038932

Sum squared resid	0.143989	F-statistic	20.85508
Durbin-Watson stat	1.477863	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	-0.186944	Mean dependent var	-1.127467
Sum squared resid	0.982151	Durbin-Watson stat	0.216664

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Interprestasi Model Terbaik

Tabel 4.20 Hasil regresi Model Terbaik

Dependent Variable: GR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 09/30/24 Time: 18:39
Sample: 2014 2023
Periods included: 10
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 100
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.883156	0.903957	7.614475	0.0000
PDRB	0.022995	0.031507	0.729841	0.4673
TPT	-0.030058	0.025521	-1.177788	0.2418
K	0.018749	0.010790	1.737676	0.0855
IPM	-1.958029	0.253162	-7.734297	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.074098	0.7961
Idiosyncratic random	0.037494	0.2039

Weighted Statistics

Root MSE	0.037946	R-squared	0.467549
Mean dependent var	-0.178144	Adjusted R-squared	0.445131
S.D. dependent var	0.052265	S.E. of regression	0.038932
Sum squared resid	0.143989	F-statistic	20.85508
Durbin-Watson stat	1.477863	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	-0.186944	Mean dependent var	-1.127467
Sum squared resid	0.982151	Durbin-Watson stat	0.216664

Sumber : Eviews 12, olahan penulis 2024

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat signifikansi 1% ($\alpha < 0,01$).

Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

Variabel	OLS (<i>ordinary Least Square</i>)	REM (<i>Random Effect Model</i>)
PDRB	0.22995***	0.22995***
	(0.729841)	(0.729841)
TPT	-0.030058***	-0.030058***
	(-1.177788)	(-1.177788)
K	0.018749***	0.018749***
	(1.737676)	(1.737676)
IPM	-1.958029***	-1.958029***
	(-7.734297)	(-7.734297)
Konstanta	6.883156**	6.883156**
	(7.614475)	(7.614475)
Number of Obs	100	100
Adj R-Squared	0.445131	0.445131
R (Correlation)	0.467549	0.467549
Uji F	20.85508	20.85508
	0.000000	0.000000
D-W (Durbin Watson)	1.477863	1.477863

Keterangan : *Level of significant, ****1%, ***5%, **10%, (t-statistic)

Sumber : Eviews 12 dan diolah

2). Penafsiran

Tabel 4.22 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

	GR	PDRB	TPT	K	IPM
Mean	-1.127467	12.04143	1.665139	6.010730	4.264574
Median	-1.119327	12.04831	1.647641	5.901153	4.265563
Maximum	-0.827822	13.30840	2.336020	7.318540	4.345233
Minimum	-1.406497	10.49701	0.955511	4.204693	4.195998
Std. Dev.	0.091423	0.789772	0.271320	0.922108	0.029818
Skewness	-0.661469	-0.299094	0.095466	-0.464623	0.183640
Kurtosis	4.968894	2.223318	2.753504	2.195345	2.997982
Jarque-Bera	23.44461	4.004426	0.405062	6.295698	0.562079
Probability	0.000008	0.135036	0.816661	0.042944	0.754999
Sum	-112.7467	1204.143	166.5139	601.0730	426.4574
Sum Sq. Dev.	0.827462	61.75027	7.287832	84.17808	0.088021
Observations	100	100	100	100	100

Data statistik diatas menunjukkan deskripsi statistik untuk lima variabel: GR (Growth Rate), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), K (Kematian), dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Berikut penjelasan singkat tiap statistik:

1. Mean (Rata-rata): GR memiliki rata-rata negatif sebesar -1.13, menunjukkan penurunan pertumbuhan. PDRB rata-rata 12.04, TPT 1.67, K 6.01, dan IPM 4.26.
2. Median: Menunjukkan nilai tengah distribusi. GR, PDRB, dan variabel lainnya memiliki nilai median yang cukup dekat dengan rata-rata, mengindikasikan distribusi yang relatif seimbang.
3. Maximum dan Minimum: Menyajikan batas tertinggi dan terendah. GR berkisar antara -1.41 hingga -0.83. PDRB memiliki variasi antara 10.50 hingga 13.31, dan variabel lainnya juga menunjukkan variasi yang moderat.
4. Std. Dev. (Standar Deviasi): GR memiliki standar deviasi 0.09, mengindikasikan variabilitas yang rendah. PDRB memiliki variasi yang lebih besar dengan standar deviasi 0.79.
5. Skewness dan Kurtosis: GR dan Kematian menunjukkan kemiringan negatif (skewness), sementara TPT dan IPM relatif simetris. Kurtosis GR lebih dari 3, menunjukkan distribusi yang lebih berat di ekor (leptokurtik).
6. Jarque-Bera Test: Hanya GR yang signifikan pada tingkat probabilitas < 0.05 ($p = 0.000008$), menunjukkan distribusi GR tidak normal, sementara variabel lain menunjukkan distribusi mendekati normal.

a. Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.467549, artinya bahwa

derajat keeratan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan hubungan yang erat terhadap Gini Ratio (GR).

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R-squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam menjelaskan variabel terikat *Gini Ratio (GR)*. Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai R^2 0.445131, artinya kontribusinya sebesar 44,51%. Sedangkan sisanya 55,49% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

3). Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikannya yaitu :

$$GR_{rt} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{rt} + \beta_2 TPT_{rt} + \beta_3 K_{rt} + \beta_4 IPM_{rt} + e$$

Interprestasi hasil model sebagai berikut :

$$GR_{rt} = 6.883156_{rt} + \beta_1 0.022995 (PDRB)_{rt} + \beta_2 -0.030058 (TPT)_{rt} + \beta_3 0.018749 (K)_{rt} + \beta_4 -1.958029 (IPM)_{rt} + e$$

Koefisien $\beta_0 = 6.883156$, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), K (Kemiskinan), dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kita abaikan maka diperkirakan Gini Ratio (GR) berkurang sebesar 6,88 dan jika dilihat dari hasil olahan data diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 ($\alpha < 0,10$) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi nilai gini ratio

akan menurun sebesar 6,88 jika mengabaikan variabel bebas diatas.

Koefisien $\beta_1 = 0.022995$, artinya jika PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) digunakan maka diperkirakan nilai Gini Ratio (GR) akan meningkat sebesar 0.02. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.4673 ($\alpha > 0,15$). Maka dapat disimpulkan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Gini Ratio.

Koefisien $\beta_2 = -0.030058$, artinya jika nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan maka diperkirakan nilai Gini Ratio (GR) akan meningkat sebesar 0,03. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.2418 ($\alpha > 0,15$). Maka dapat disimpulkan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Gini Ratio.

Koefisien $\beta_3 = 0.018749$, artinya jika Kemiskinan (K) digunakan maka diperkirakan nilai Gini Ratio (GR) akan menurun sebesar 0,01. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0855 ($\alpha < 0,10$). Maka dapat disimpulkan Kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Gini Ratio.

Koefisien $\beta_4 = -1.958029$, artinya jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan maka diperkirakan nilai Gini Ratio (GR) akan meningkat sebesar -1,95. Dan jika dilihat dari hasil olahan di atas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0000($\alpha < 00,1$). Maka dapat disimpulkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai terhadap Gini Ratio.

4). Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari $df = (n-k) = 100 - 5 = 95$ dengan ($\alpha = 10\%$) maka nilai t tabel sebesar ± 1.66105 .

Kriteria uji: Terima H_0 jika $-t\text{-tabel} < t\text{-hitung} < +t\text{-tabel}$

Tabel 4.23 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.883156	0.903957	7.614475	0.0000
PDRB	0.022995	0.031507	0.729841	0.4673
TPT	-0.030058	0.025521	-1.177788	0.2418
K	0.018749	0.010790	1.737676	0.0855
IPM	-1.958029	0.253162	-7.734297	0.0000

Sumber: E-views 12 dan diolah

Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- t hitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di dalam $\pm t$ tabel maka terima H_0 artinya ada hubungan yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Gini Ratio (GR). Namun dari hasil olahan menyatakan tidak signifikan dengan probabilitas 0.4673 atau pada alpha ($\alpha > 15\%$)
- t hitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di dalam $\pm t$ tabel maka terima H_0 artinya ada hubungan yang signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Gini Ratio (GR). Namun dari hasil olahan menyatakan tidak signifikan dengan probabilitas 0.2418 atau pada alpha ($\alpha > 15\%$)
- t hitung Kemiskinan (K) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara Kemiskinan (K) terhadap Gini Ratio (GR).

Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0855 atau pada alpha ($\alpha = 10\%$)

d. t hitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di luar $\pm t$ tabel maka tolak H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Gini Ratio (GR). Namun dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan probabilitas 0.0000 atau pada alpha ($\alpha = 1\%$)

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji-F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 4.24 Hasil Uji F

R-squared	0.467549
Adjusted R-squared	0.445131
S.E. of regression	0.038932
F-statistic	20.85508
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: E-views 12 dan diolah

Dari hasil regresi didapati variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Gini Ratio (GR) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000000 dan nilai F statistic sebesar 20.85508.

Nilai F hitung akan dibandingkan dengan F tabel = $F(\alpha, n - k - 1)$ dengan derajat kesalahan $\alpha = 10\%$, maka F tabel = $(10\% ; 100-5-1) = (0.1 ; 94)$ dengan demikian nilai F tabel adalah 1.93.

Kriteria uji

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Kesimpulan yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti terima H_0 . Artinya ada hubungan secara serentak antara variabel Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Gini Ratio (GR).

5) Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.25 Hasil Uji Multikolinearitas

	PDRB	TPT	K	IPM
PDRB	1	0.368267	0.611404	0.140352
TPT	0.368267	1	0.090398	0.375093
K	0.611404	0.090398	1	-0.274488
IPM	0.140352	0.375093	-0.274488	1

Sumber: E-views 12 dan diolah

Uji multikolinearitas digunakan untuk keberadaan dari hubungan linier yang sempurna atau tepat diantara sebagian atau seluruh variabel perjas dalam sebuah model regresi. Dalam uji multikolinearitas pada regresi data panel menggunakan metode pair wise correlation, dengan ketentuan nilai koefisien korelasi harus dibawah 0,80 untuk terbebas dari masalah multikolinearitas. Dari hasil uji di atas terlihat bahwa semua nilai koefisien korelasi dari variabel bebas berada dibawah 0,80 dan menyatakan bahwa pada model ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.26 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSRES
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 09/30/24 Time: 18:55
 Sample: 2014 2023
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.107417	0.808377	-0.132880	0.8946
PDRB	-0.024809	0.023021	-1.077650	0.2839
TPT	0.032107	0.023247	1.381133	0.1705
K	-0.007905	0.009790	-0.807402	0.4215

IPM	0.110697	0.213561	0.518338	0.6054
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.052119	0.6895
Idiosyncratic random			0.034976	0.3105
Weighted Statistics				
Root MSE	0.034537	R-squared		0.043008
Mean dependent var	0.014920	Adjusted R-squared		0.002713
S.D. dependent var	0.035482	S.E. of regression		0.035434
Sum squared resid	0.119280	F-statistic		1.067337
Durbin-Watson stat	1.476556	Prob(F-statistic)		0.377080
Unweighted Statistics				
R-squared	0.207620	Mean dependent var		0.071871
Sum squared resid	0.368936	Durbin-Watson stat		0.477382

Sumber: E-views 12 dan diolah

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpanan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya perbedaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam uji heteroskedastisitas pada regresi data panel menggunakan uji heteroskedastisitas glejser dengan ketentuan nilai probabilitas dari masing-masing variabel diatas 0,05 (sig. > 0,05). Dari hasil uji diatas terlihat bahwa nilai probabilitas dari semua variabel berada dibawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.27 Hasil Uji Autokorelasi

Weighted Statistics			
Root MSE	0.037946	R-squared	0.467549
Mean dependent var	-0.178144	Adjusted R-squared	0.445131
S.D. dependent var	0.052265	S.E. of regression	0.038932
Sum squared resid	0.143989	F-statistic	20.85508
Durbin-Watson stat	1.477863	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: E-views 12 dan diolah

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Pada uji autokorelasi ini menggunakan nilai Durbin-Watson stat dalam melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi. Nilai Durbin Watson sebesar 1.477863 dengan ketentuan dibawah 2 artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

4.4 Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.4673 ($\alpha > 0,10$). Maka dapat disimpulkan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Gini Ratio. Sejalan dengan ini, pada penelitian sebelumnya bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Distribusi Pendapatan (Puspita, 2019). Sekalipun PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah namun tidak secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan, karena nilai PDRB hanya mencerminkan total nilai produksi. Nilai PDRB tidak menjelaskan bagaimana distribusi pendapatan antar masyarakat. Oleh karena itu untuk tetap mempertahankan aspek tersebut pemerintah dapat mengambil langkah strategis yaitu dengan mendorong pertumbuhan sektor yang menyerap tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, pemerataan pembangunan infrastruktur, kebijakan residusi pendapatan pentingnya bagi pemerintah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek kesetaraan dalam distribusi pendapatan. Dengan strategi-strategi ini, dapat membantu

mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara berkelanjutan.

b. Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan ternyata tidak signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.2418 ($\alpha > 0,10$). Maka dapat disimpulkan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Gini Ratio. Semakin banyak orang bekerja maka semakin menurun tingkat kemiskinan karena masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah sehingga hal tersebut menyebabkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa variabel tingkat Pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Arif, 2018). Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun tingkat tingkat pengangguran terbuka mungkin berubah, hal tersebut tidak secara langsung berdampak pada perubahan dalam ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu untuk mempertahankan hal tersebut, penanggulangan pengangguran menjadi prioritas dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan program yang melibatkan sektor swasta dan mempromosikan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan tenaga kerja juga perlu diperhatikan untuk menghadapi tuntutan

pasar kerja yang terus berubah.

c. Pengaruh Kemiskinan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0855 ($\alpha < 0,10$). Maka dapat disimpulkan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Gini Ratio. Sejalan dengan ini, pada penelitian sebelumnya bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif (Arif, 2018). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan mengidentifikasi bahwa kemiskinan berkontribusi secara langsung terhadap meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan karena orang-orang yang berada dalam kemiskinan memiliki keterbatasan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara kelompok berpendapatan tinggi terus memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan saling terkait, dimana ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan meningkatnya ketimpangan menarik individu dari atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut upaya pemerintah antara lain dengan melakukan pemerataan distribusi pendapatan, penguatan jaringan perlindungan sosial seperti bantuan pangan, subsidi kesehatan, pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja melalui investasi di sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur dan agribisnis. Dengan

menerapkan beberapa strategi ini pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pada saat yang sama dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara berkelanjutan.

d. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya $0.0000(\alpha < 0,1)$. Maka dapat disimpulkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap nilai terhadap Gini Ratio. Sejalan dengan ini, pada penelitian sebelumnya bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Dwiputra W., & Indrawati 2018). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Indeks pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, adanya peningkatan kualitas IPM disebabkan berkembang pesat pada daerah untuk memperoleh fasilitas seperti kesehatan, pendidikan yang layak. Hal itu mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga layak mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dengan upah yang lebih tinggi. Perlu digaris bawahi bahwa dampak positif adanya ketimpangan ialah memacu persaingan antar daerah menjadi lebih baik. Adanya pemerataan IPM akan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertahankan langkah strategis dengan melakukan hal tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara analisis ekonomi deskriptif menjelaskan Koefisien Gini di 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan bahwa Riau memiliki tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi (0.35-0.36), diikuti oleh Sumatera Utara (0.34-0.35), sementara provinsi dengan ketimpangan moderat seperti Sumatera Selatan, Lampung, dan Bangka Belitung berada di kisaran 0.32 hingga 0.34. Jambi dan Bengkulu juga menunjukkan stabilitas di angka 0.31 hingga 0.33. Di sisi lain, Sumatera Barat dan Aceh memiliki Koefisien Gini yang lebih rendah (0.30-0.32), mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Temuan ini mengindikasikan variasi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi seperti PDRB, Tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia di masing-masing provinsi.
2. Dari hasil regresi menggunakan model ekonometrika menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Gini Ratio* (GR) secara parsial. Sedangkan secara simultan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kemiskinan (K), dan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap variabel *Gini Ratio* (GR).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyusun dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi, khususnya di Riau dan Sumatera Utara, perlu merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.
2. Program-program yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di provinsi dengan ketimpangan moderat seperti Sumatera Selatan dan Lampung, perlu diperkuat. Hal ini dapat mencakup dukungan untuk usaha kecil dan menengah serta pengembangan sektor pertanian dan industri lokal.
3. Mengingat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Gini Ratio, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program-program sosial harus dirancang agar lebih efektif dalam mencapai kelompok yang paling membutuhkan.
4. Pemerintah diharapkan mampu mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sehingga

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sangat penting untuk mengurangi ketimpangan. Investasi dalam infrastruktur dan layanan publik juga akan mendukung perbaikan kondisi hidup masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pemerataan agar tidak terjadinya ketimpangan antar wilayah di pulau Sumatera, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan provinsi di pulau Sumatera dapat berkurang.

5. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap dampak kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan. Data dan analisis yang diperoleh dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi dan intervensi di masa depan.
6. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2014-2016. *Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi*, 1–69. https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7651/Skripsi_Aldi_Abdullah_Arif_14313285_PDF.pdf?sequence=1
- Arsyad, lincoln. 2004. *“Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2024. Produk Domestik Reginonal Bruto Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2023. Gini Ratio Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2022. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. Kemiskinan Indonesia Tahun 2022. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistika (BPS) 2022. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2022. Jakarta: BPS www.bps.go.id.
- Dwiputra, R. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia (Periode 2011-2016)*.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>.
- Firmansyah, U., & Ahmad, E. (2022). *PDRB sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi pendapatan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera*. 11 (1), 9-14.
- Jhingan. 2010. *“Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Cetakan ke 13”*. Jakarta : Rajawali Press.
- Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2010). *Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and Practices*. Washington, D.C: The World
- Kuncoro, Mudrajad 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta

- Kuncoro, Mudrajad. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit Dan Percetakan PN
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta: Erlangga
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Murni, A. 2009. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>
- Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.
- Rahayu, S. E. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Perdana publishing.
- Roswita Hafni, 2024, *Statistika Ekonomi*, Perdana Publishing, Medan.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ke-3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. (2013). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael, 1998 ed.6. *Economic Development in the Third World*. London: Longman, Inc.
- Todaro, Michael. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004.
- Todaro, Michael.P ., & Smith, S.C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

A. Data Regresi Linear Berganda (Diolah)

Provinsi	Tahun	PDRB	TPT	K	IPM	KDP
Aceh	2014	113.490,00	9,02	837	68,81	0,337
Aceh	2015	112.665,53	9,93	859	69,45	0,339
Aceh	2016	116.374,30	7,57	841	70	0,341
Aceh	2017	121.240,98	6,57	830	70,6	0,329
Aceh	2018	126.824,37	6,34	832	71,19	0,318
Aceh	2019	132.069,62	6,17	810	71,9	0,321
Aceh	2020	131.580,97	6,59	815	71,99	0,319
Aceh	2021	135.274,04	6,3	834	72,18	0,323
Aceh	2022	140.971,72	6,17	807	72,8	0,291
Aceh	2023	146.932,42	6,03	807	73,4	0,296
Sumatera Utara	2014	419.573,00	6,23	1.360	68,87	0,31
Sumatera Utara	2015	440.955,53	6,71	1.508	69,51	0,326
Sumatera Utara	2016	463.775,46	5,84	1.453	70	0,312
Sumatera Utara	2017	487.531,23	5,6	1.327	70,57	0,335
Sumatera Utara	2018	512.762,63	5,55	1.292	71,18	0,311
Sumatera Utara	2019	539.513,85	5,39	1.261	71,74	0,315
Sumatera Utara	2020	533.746,36	6,91	1.283	71,77	0,314
Sumatera Utara	2021	547.651,82	6,33	1.344	72	0,313
Sumatera Utara	2022	573.528,77	6,16	1.268	72,71	0,326
Sumatera Utara	2023	602.235,95	5,89	1.240	73,37	0,309
Sumatera Barat	2014	133.341,00	6,5	355	69,36	0,332
Sumatera Barat	2015	140.719,47	6,89	350	69,98	0,319

Sumatera Barat	2016	148.134,24	5,09	377	70,73	0,312
Sumatera Barat	2017	155.984,36	5,58	360	71,24	0,312
Sumatera Barat	2018	163.996,19	5,66	353	71,73	0,305
Sumatera Barat	2019	172.205,57	5,38	343	72,39	0,307
Sumatera Barat	2020	169.426,61	6,88	344	72,38	0,301
Sumatera Barat	2021	174.999,89	6,52	371	72,65	0,3
Sumatera Barat	2022	182.629,14	6,28	335	73,26	0,292
Sumatera Barat	2023	191.071,35	5,94	340	73,75	0,28
Riau	2014	447.987,00	6,56	498	70,33	0,379
Riau	2015	448.991,96	7,83	563	70,84	0,366
Riau	2016	458.769,34	7,43	502	71,2	0,347
Riau	2017	470.983,51	6,22	496	71,79	0,325
Riau	2018	482.064,63	5,98	494	72,44	0,347
Riau	2019	495.607,05	5,76	484	73	0,331
Riau	2020	489.995,75	6,32	483	72,71	0,321
Riau	2021	506.471,91	4,42	501	72,94	0,327
Riau	2022	529.532,98	4,37	485	73,52	0,323
Riau	2023	551.828,49	4,23	486	74,04	0,324
Jambi	2014	119.991,00	5,08	124	68,24	0,342
Jambi	2015	125.037,40	4,34	312	68,89	0,344
Jambi	2016	130.501,13	4	291	69,62	0,346
Jambi	2017	136.501,71	3,87	279	69,99	0,334
Jambi	2018	142.902,00	3,73	281	70,65	0,335
Jambi	2019	149.111,09	4,06	273	71,26	0,324
Jambi	2020	148.354,25	5,13	278	71,29	0,316
Jambi	2021	153.850,63	5,09	294	71,63	0,315
Jambi	2022	161.730,02	4,59	279	72,14	0,335
Jambi	2023	169.268,77	4,53	281	72,77	0,343
Sumatera Selatan	2014	243.298,00	4,96	282	66,75	0,381
Sumatera Selatan	2015	254.044,88	6,07	1.113	67,46	0,334
Sumatera Selatan	2016	266.857,40	4,31	1.097	68,24	0,362
Sumatera Selatan	2017	281.571,01	4,39	1.087	68,86	0,365
Sumatera Selatan	2018	298.484,07	4,27	1.076	69,39	0,341
Sumatera Selatan	2019	315.464,75	4,53	1.067	70,02	0,339
Sumatera Selatan	2020	315.129,22	5,51	1.082	70,01	0,338
Sumatera Selatan	2021	326.405,18	4,98	1.114	70,24	0,34
Sumatera Selatan	2022	343.459,88	4,63	1.045	70,9	0,33
Sumatera Selatan	2023	360.911,01	4,11	1.046	71,62	0,338
Bengkulu	2014	36.207,00	3,47	316	68,06	0,355
Bengkulu	2015	38.066,01	4,91	323	68,59	0,371
Bengkulu	2016	40.076,54	3,3	326	69,33	0,354
Bengkulu	2017	42.073,52	3,74	303	69,95	0,349
Bengkulu	2018	44.164,11	3,35	304	70,64	0,355
Bengkulu	2019	46.345,45	3,26	298	71,21	0,329

Bengkulu	2020	46.338,43	4,07	303	71,4	0,323
Bengkulu	2021	47.853,78	3,65	306	71,64	0,321
Bengkulu	2022	49.916,06	3,59	297	72,16	0,315
Bengkulu	2023	52.040,88	3,42	288	72,78	0,333
Lampung	2014	189.797,00	4,79	67	66,42	0,331
Lampung	2015	199.536,92	5,14	1.101	66,95	0,352
Lampung	2016	209.793,73	4,62	1.140	67,65	0,358
Lampung	2017	220.626,10	4,33	1.084	68,25	0,333
Lampung	2018	232.165,99	4,04	1.092	69,02	0,326
Lampung	2019	244.378,31	4,03	1.041	69,57	0,331
Lampung	2020	240.319,59	4,67	1.049	69,69	0,32
Lampung	2021	246.966,49	4,69	1.084	69,9	0,314
Lampung	2022	257.534,19	4,52	1.002	70,45	0,313
Lampung	2023	269.240,54	4,23	971	71,15	0,324
Kep. Bangka Belitung	2014	44.159,00	5,14	317	68,27	0,295
Kep. Bangka Belitung	2015	45.962,30	6,29	67	69,05	0,275
Kep. Bangka Belitung	2016	47.848,37	2,6	71	69,55	0,288
Kep. Bangka Belitung	2017	49.985,15	3,87	76	69,55	0,276
Kep. Bangka Belitung	2018	52.208,04	3,61	70	70,67	0,272
Kep. Bangka Belitung	2019	53.941,90	3,58	67	71,3	0,262
Kep. Bangka Belitung	2020	52.705,94	5,25	68	71,47	0,257
Kep. Bangka Belitung	2021	55.369,65	5,03	73	71,69	0,247
Kep. Bangka Belitung	2022	57.805,15	4,77	67	72,24	0,255
Kep. Bangka Belitung	2023	60.338,14	4,56	69	72,85	0,245
Kep. Riau	2014	146.325,00	6,69	144	73,4	0,437
Kep. Riau	2015	155.131,35	6,2	115	73,75	0,339
Kep. Riau	2016	162.853,04	7,69	119	73,99	0,352
Kep. Riau	2017	166.081,68	7,16	128	74,45	0,359
Kep. Riau	2018	173.498,75	8,04	125	74,84	0,339
Kep. Riau	2019	181.877,67	7,5	128	75,48	0,337
Kep. Riau	2020	174.959,21	10,34	132	75,59	0,334
Kep. Riau	2021	180.952,44	9,91	144	75,79	0,339
Kep. Riau	2022	190.163,70	8,23	152	76,46	0,325
Kep. Riau	2023	200.043,86	6,8	143	77,11	0,34

B. Statistika Deskriptif

	GR	PDRB	TPT	K	IPM
Mean	-1.127467	12.04143	1.665139	6.010730	4.264574
Median	-1.119327	12.04831	1.647641	5.901153	4.265563

Maximum	-0.827822	13.30840	2.336020	7.318540	4.345233
Minimum	-1.406497	10.49701	0.955511	4.204693	4.195998
Std. Dev.	0.091423	0.789772	0.271320	0.922108	0.029818
Skewness	-0.661469	-0.299094	0.095466	-0.464623	0.183640
Kurtosis	4.968894	2.223318	2.753504	2.195345	2.997982
Jarque-Bera	23.44461	4.004426	0.405062	6.295698	0.562079
Probability	0.000008	0.135036	0.816661	0.042944	0.754999
Sum	-112.7467	1204.143	166.5139	601.0730	426.4574
Sum Sq. Dev.	0.827462	61.75027	7.287832	84.17808	0.088021
Observations	100	100	100	100	100

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- **Data Pribadi**

Nama : Arika Yunita
 NPM : 2005180053P
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jatirejo, 29 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Desa Jatirejo, Kecamatan Pagar merbau

- **Data Pendidikan Formal**

Tahun 2006-2012 : SDN 101911 Sidodadi
 Tahun 2012-2015 : MTs. Alwashliyah jatirejo
 Tahun 2015-2018 : SMKS Nusantara Lubuk Pakam
 Tahun 2020-2024 : Tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Medan, Oktober 2024

Arika Yunita